

# SKRIPSI

## **ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**



Oleh:

**NABILAH TYAS GARINI  
175310151**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

# SKRIPSI

## **ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**NABILAH TYAS GARINI  
175310151**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## ABSTRAK

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan menggunakan prinsip *value for money*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif, dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 pada Program Pendidikan Menengah dikategorikan ekonomis, cukup efisien, kurang efektif. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dikategorikan ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Program Pendidikan Khusus dikategorikan ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Sehingga, dapat disimpulkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum sesuai dengan prinsip *value for money*.

**Kata kunci:** kinerja keuangan, *value for money*

## **ABSTRACT**

*The research was conducted at the Education Office of Riau Province. This research aims to analyze the financial performance of the Riau Province Education Office in the Secondary Education Program, Education Service Management Program, and Special Education and Special Service Program using the principle of value for money.*

*The research method used in this study is a qualitative research approach with descriptive analysis techniques, and data collection techniques in the form of documentation. The data used in this study are the Performance Accountability Report of Government Agencies and the Budget Realization Report of the Riau Province Education Office in 2018 and 2019.*

*The results showed that the financial performance of the Riau Province Education Office in 2018 and 2019 in the Secondary Education Program was categorized as economical, quite efficient, less effective. The Education Service Management Program is categorized as economical, efficient, and less effective. Special Education Programs are categorized as economical, efficient, and less effective. Thus, it can be concluded that the performance accountability of the Riau Provincial Education Office is not in accordance with the principle of value for money.*

**Keywords:** *financial performance, value for money*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Value for Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau**”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak sebagai ketua program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA, ACPA selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Emkhad Arif, SE., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Tidak terlepas juga kepada staf tata usaha dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, terutama kepada Bapak Zul Ikram, S.pd., M.pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian. Kemudian, kepada staf bagian perencanaan program, dan staf bagian keuangan yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi berkaitan dengan penelitian ini.
7. Kedua Orang Tua tercinta, yakni Bapak Susilo dan Ibu Oktavia Yumulana, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moral dan materiil, serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya.
8. Kepada Firsty Etikayana, Isra Hafira, dan Nail Hidayah Afandi selaku sahabat yang selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita, dan memberi energi positif berupa motivasi moral kepada penulis agar tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi kelas E angkatan 2017, terimakasih atas segala pengalaman dan waktu yang dilewati bersama-sama selama proses perkuliahan kurang lebih 4 tahun ini. Khususnya kepada Pazri Annisya, Rosa Linda, Jihan Melsyaputri, dan Riza Elsanda, yang turut

membantu dan menjadi *support systems* selama proses penyusunan skripsi berlangsung hingga akhirnya dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 10 Juli 2021



Nabilah Tyas Garini

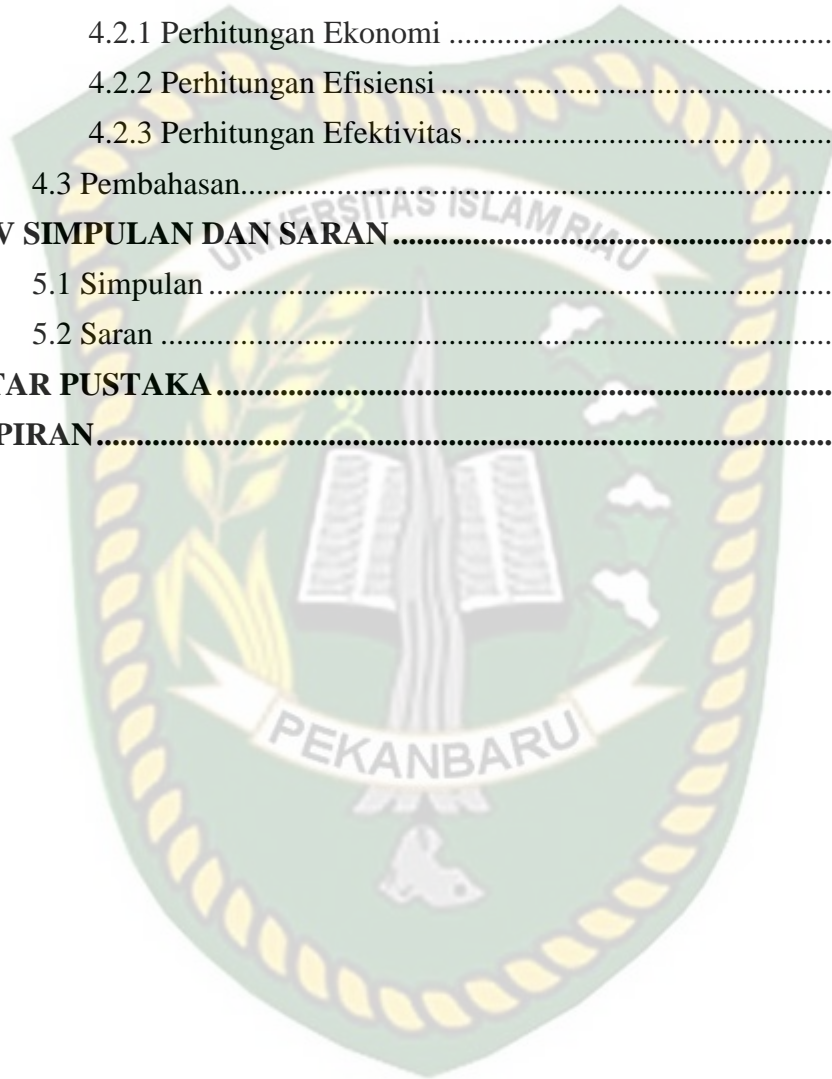
## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI</b> ..	
<b>BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL</b> .....	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	
<b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN</b>	
<b>PENGUJI SKRIPSI</b> .....	
<b>BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PERBAIKAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>12</b>
2.1 Telaah Pustaka .....	12
2.1.1 Organisasi Sektor Publik .....	12
2.1.1.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik.....	12
2.1.1.2 Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik.....	13
2.1.2 Kinerja .....	13



2.1.2.1 Pengertian Kinerja.....	13
2.1.2.2 Pengertian Kinerja Keuangan.....	14
2.1.2.3 Indikator Kinerja .....	14
2.1.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik .....	16
2.1.3.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	16
2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	16
2.1.4 <i>Value for Money</i> .....	17
2.1.4.1 Definisi <i>Value for Money</i> .....	17
2.1.4.2 Konsep <i>Value for Money</i> .....	18
2.1.4.3 Indikator <i>Value for Money</i> .....	19
2.1.4.4 Manfaat Implementasi <i>Value for Money</i> .....	20
2.1.5 Akuntabilitas.....	21
2.1.6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	22
2.1.7 Anggaran.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
2.4 Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Desain Penelitian .....	27
3.2 Objek Penelitian.....	28
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	28
3.3.1 Ekonomi.....	28
3.3.2 Efisiensi .....	29
3.3.3 Efektivitas .....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Data Primer .....	31
3.4.2 Data Sekunder.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5.1 Dokumentasi .....	32
3.5.2 Studi Kepustakaan .....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Singkat dan Profil Dinas Pendidikan Provinsi Riau ..	34

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau .....	35
4.1.3 Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau	36
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau .....	36
4.2 Hasil Penelitian .....	38
4.2.1 Perhitungan Ekonomi .....	39
4.2.2 Perhitungan Efisiensi .....	59
4.2.3 Perhitungan Efektivitas .....	72
4.3 Pembahasan.....	86
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Simpulan .....	97
5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program dan Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Riau .....	5
Tabel 1.2	Realisasi APBD Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019.....	5
Tabel 1.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1	Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Menengah Tahun 2018....	40
Tabel 4.2	Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Menengah Tahun 2019....	43
Tabel 4.3	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi.....	47
Tabel 4.4	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi.....	47
Tabel 4.5	Perhitungan Ekonomi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 .....	48
Tabel 4.6	Perhitungan Ekonomi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 .....	50
Tabel 4.7	Jumlah Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi.....	53
Tabel 4.8	Jumlah Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi.....	53
Tabel 4.9	Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018 .....	54
Tabel 4.10	Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019.....	56
Tabel 4.11	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi .....	58

Tabel 4.12	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi .....	58
Tabel 4.13	Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Menengah Tahun 2018 ..	60
Tabel 4.14	Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Menengah Tahun 2019 ..	61
Tabel 4.15	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi .....	64
Tabel 4.16	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi .....	64
Tabel 4.17	Perhitungan Efisiensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018.....	65
Tabel 4.18	Perhitungan Efisiensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019.....	66
Tabel 4.19	Jumlah Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi .....	68
Tabel 4.20	Jumlah Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi .....	68
Tabel 4.21	Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018.....	69
Tabel 4.22	Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019.....	70
Tabel 4.23	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi.....	71
Tabel 4.24	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi.....	71
Tabel 4.25	Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Menengah Tahun 2018.....	73



Tabel 4.26	Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Menengah Tahun 2019.....	74
Tabel 4.27	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas.....	77
Tabel 4.28	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas.....	77
Tabel 4.29	Perhitungan Efektivitas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018.....	78
Tabel 4.30	Perhitungan Efektivitas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019.....	79
Tabel 4.31	Jumlah Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas.....	82
Tabel 4.32	Jumlah Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas.....	82
Tabel 4.33	Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018.....	83
Tabel 4.34	Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019.....	84
Tabel 4.35	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas....	85
Tabel 4.36	Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas....	85
Tabel 4.37	<i>Value for Money</i> Akuntabilitas Kinerja .....	95

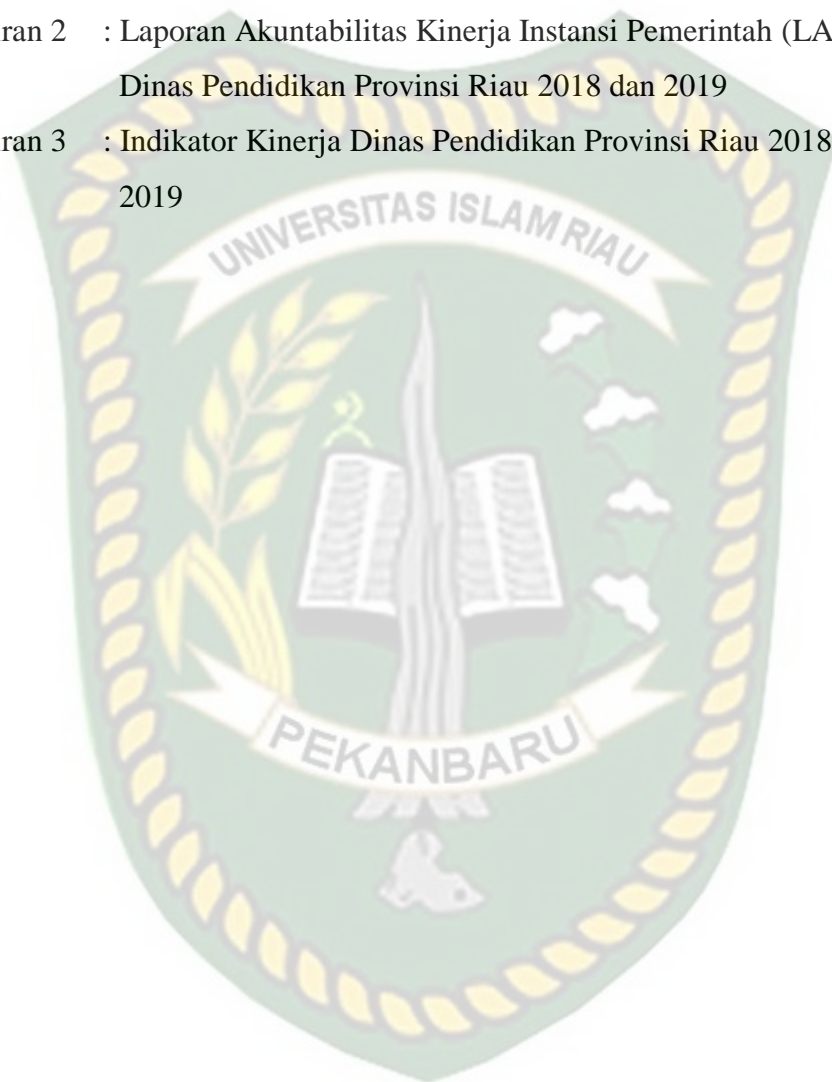
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Value for Money Chain</i> .....	20
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau .....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2018 dan 2019
- Lampiran 3 : Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2018 dan  
2019



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dalam suatu negara. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia demi berlangsungnya proses pembangunan nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan masyarakat. Eksistensi pentingnya pendidikan di Indonesia nyata adanya dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah harus bersifat transparan ke publik. Masyarakat sebagai pengguna informasi publik harus mengetahui sampai sejauh mana perkembangan upaya peningkatan yang telah dilakukan pemerintah, sehingga dapat memberikan *feedback* dan masukan terhadap kualitas performa pemerintah ke depannya. Maka dari itu, dibentuklah instansi atau organisasi pemerintah sebagai wadah informasi publik dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menunjang peningkatan kualitas di bidang pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan adalah lembaga pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik. Sebagaimana Halim dan Kusufi (2018:11) menjelaskan: “entitas organisasi sektor publik sering kali merujuk pada organisasi pemerintahan, mulai



dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, atau kota”. Di Indonesia sendiri setiap daerah memiliki Dinas Pendidikan masing-masing, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan di setiap daerahnya. Termasuk di Provinsi Riau yang memiliki Dinas Pendidikan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru. Adapun visi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu terwujudnya layanan mutu pendidikan Provinsi Riau yang berdaya saing. Tujuan ini selaras dengan tujuan organisasi sektor publik, yaitu tidak berorientasi pada *profit*, melainkan fokus pada pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, tentu tidak terlepas dari berbagai masalah pendidikan yang mempengaruhinya. Salah satunya berita yang dilansir pada Cakaplah.com, 2020 yang menyebutkan bahwa:

Persentase angka putus sekolah di Provinsi Riau menempati posisi tertinggi ketiga secara nasional, yaitu sebesar 44,37 persen. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Provinsi Riau 2019, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) masih rendah. Data menunjukkan bahwa APK/APM SMA Provinsi Riau Tahun 2018/2019 APK (82,54) APM (63,81). Sedangkan secara Nasional pada tahun 2020 APK Nasional adalah 97% (dikutip dari Permendikbud nomor 80 tahun 2013 pasal 2 ayat 2). Artinya, APK/APM Provinsi Riau masih Rendah dibawah Nasional.

Dalam pembangunan di bidang pendidikan, APK dan APM menjadi indikator utama untuk melihat tingkat kualitas program pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Melihat fenomena ini, tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus mampu merencanakan dan memberikan hasil kinerja yang baik berkaitan dengan

peningkatan pelayanan di bidang pendidikan. Kinerja yang baik harus dilandaskan dengan akuntabilitas yang baik juga.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Akuntabilitas bukan hanya tentang kemampuan menunjukkan bagaimana sumber dana yang diperoleh suatu organisasi atau instansi pemerintah telah dibelanjakan, akan tetapi juga mencakup kemampuan untuk menunjukkan apakah sumber dana tersebut telah dibelanjakan sesuai dengan ketentuannya. Sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa Dinas Pendidikan telah memberikan layanan guna meningkatkan mutu pendidikan kepada masyarakat, maka informasi mengenai perencanaan kinerja, aktivitas, dan hasil kerjanya akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari upaya lembaga pemerintah dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja serta pemenuhan kewajiban dalam urusan pemerintahan. Dari laporan kinerja ini, masyarakat sebagai pengguna informasi publik dapat mengetahui secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja suatu instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan hasil nyata suatu instansi atau organisasi baik dari kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran yang sudah disepakati sebelumnya. Artinya, kinerja dapat dikatakan berhasil jika suatu organisasi memiliki kriteria keberhasilan atau tolak ukur kinerja berupa target yang hendak dicapai. Untuk menentukan tolak ukur kinerja yang sesuai maka

diperlukannya sistem pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membantu organisasi berfokus pada sasaran yang sudah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan suatu organisasi guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja yang reliabel merupakan kunci untuk menilai keberhasilan organisasi. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai *feedback* dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien agar suatu instansi dapat memperbaiki kinerja pada periode berikutnya, baik dari segi perencanaan maupun implementasi. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif maka dapat diukur dengan analisis *value for money*.

*Value for money* adalah konsep pengukuran kinerja yang berdasarkan pada elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Halim dan Kusufi, 2018:128). Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tuntutan ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, serta bertanggung jawab yang didasarkan dengan asas keadilan. Melalui *value for money* diharapkan organisasi atau instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja serta dapat meminimalisir pemborosan dan sumber kebocoran dana, karena *value for money* dapat memberikan informasi apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai (*value*) bagi masyarakatnya.

Anggaran merupakan salah satu indikator dalam pengukuran kinerja keuangan. Kinerja pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi APBD merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah direncanakan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengimplementasikannya melalui program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Berikut ini adalah data rincian program dan bidang, serta realisasi APBD setiap program pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

**Tabel 1. 1**  
**Program dan Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

No.	Program	Bidang
	<b>Program Non Urusan</b>	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
3.	Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Sekretariat
	<b>Program Urusan Wajib</b>	
4.	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan Menengah
5.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	PKPLK
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendataan

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

**Tabel 1. 2**  
**Realisasi APBD Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019**

No.	Program	Tahun (%)	
		2018	2019
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,81	87,11
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,13	79,52
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78,34	52,35
4.	Program Pendidikan Menengah	73,65	87,73
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	67,24	73,50
6.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	85,86	53,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019



Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan peningkatan atas realisasi anggaran dari beberapa program. Pada Program Urusan Wajib yang merupakan program utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, terdapat satu program yang mengalami penurunan persentase realisasi anggaran, yaitu Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Kemudian, terdapat juga dua program yang mengalami peningkatan persentase realisasi anggaran, yaitu Program Pendidikan Menengah dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus terjadi penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 32,7% (dari 85,86% menjadi 53,16%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi terhadap anggaran dengan tidak dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Meubiler PKPLK. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena spesifikasi barang tidak ada yang sama dengan spesifikasi yang ada di *e-catalog*, dan berdasarkan survei di lapangan membutuhkan waktu satu bulan untuk proses lelang, dan untuk pembuatan barang diperkirakan menghabiskan waktu tiga sampai empat bulan karena meubiler untuk siswa SLB disesuaikan dengan kebutuhan (*custom*).

Pada tahun 2019 kegiatan pada Program Pendidikan Menengah dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan bertambah. Hal ini diharapkan dapat menunjang efektivitas pada kedua program tersebut dalam mencapai peningkatan aksesibilitas mutu pendidikan. Sehingga dengan bertambahnya kegiatan dari masing-masing kedua program tersebut, maka penggunaan atau realisasi anggaran pada kedua program tersebut pun meningkat.

Berikut disajikan perbandingan capaian indikator kinerja Dinas pendidikan Provinsi Riau dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan tahun 2018-2019.

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA/SMK/MA/PAKET C (Provinsi)	93,41	82,54	88,36	84,96	86,65	101,99
	APK SM Sederajat (Nasional)			88,55			92,92
	APM SMA/SMK/MA/PAKET C (Provinsi)	70,43	63,81	90,60	61,59	66,86	108,56
	APM SM Sederajat (Nasional)			67,14			70,99

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat capaian APK dan APM Provinsi Riau dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun, dari peningkatan capaian kinerja tersebut APK dan APM Provinsi pada tahun 2019 masih dibawah APK dan APM Nasional, yang artinya masih ada 13,35% siswa lagi yang belum bersekolah, dan 19,79% siswa yang bersekolah tidak sesuai kelompok usia.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator APK dan APM Sekolah Menengah Sederajat di Provinsi Riau, antara lain: tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata, masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan

jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019:24) menyatakan bahwa APK dan APM menggambarkan efektivitas suatu program dalam menyerap potensi pendidikan. Semakin tinggi nilainya, maka menunjukkan semakin efektif suatu program.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan, yaitu APK dan APM SM Sederajat Provinsi Riau tahun 2018/2019 masih dibawah nasional, sehingga angka putus sekolah pada tingkat SM Sederajat Provinsi Riau tahun tersebut masih dikategorikan tinggi. Maka dari itu, perlu dilakukannya pengukuran kinerja keuangan terhadap program-program yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, khususnya Program Urusan Wajib yang mana merupakan program utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Pada Program Urusan Wajib ini, persentase realisasi anggarannya mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan realisasi anggaran menunjukkan bahwa rendahnya daya serap anggaran, bermakna sisa anggaran berjumlah banyak di akhir tahun. Menurut Mardiasmo (2018:165) menyatakan bahwa ekonomi merupakan jasa *input* dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Jika terjadinya peningkatan biaya mestinya harus disertai dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Urusan Wajib, yaitu Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, diukur dengan menggunakan prinsip *value for money*?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Urusan Wajib, yaitu Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dengan menggunakan prinsip *value for money*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis, dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai pengukuran kinerja dengan pendekatan analisis *value for money*.
2. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang penilaian kerja dengan menggunakan konsep *value for money* sebagai evaluasi kinerja, agar ke depannya dapat menghasilkan hasil kinerja yang lebih optimal.



3. Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada permasalahan yang sejenis.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II :TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai teori-teori pendukung yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam pembahasan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III :METODE PENELITIAN**

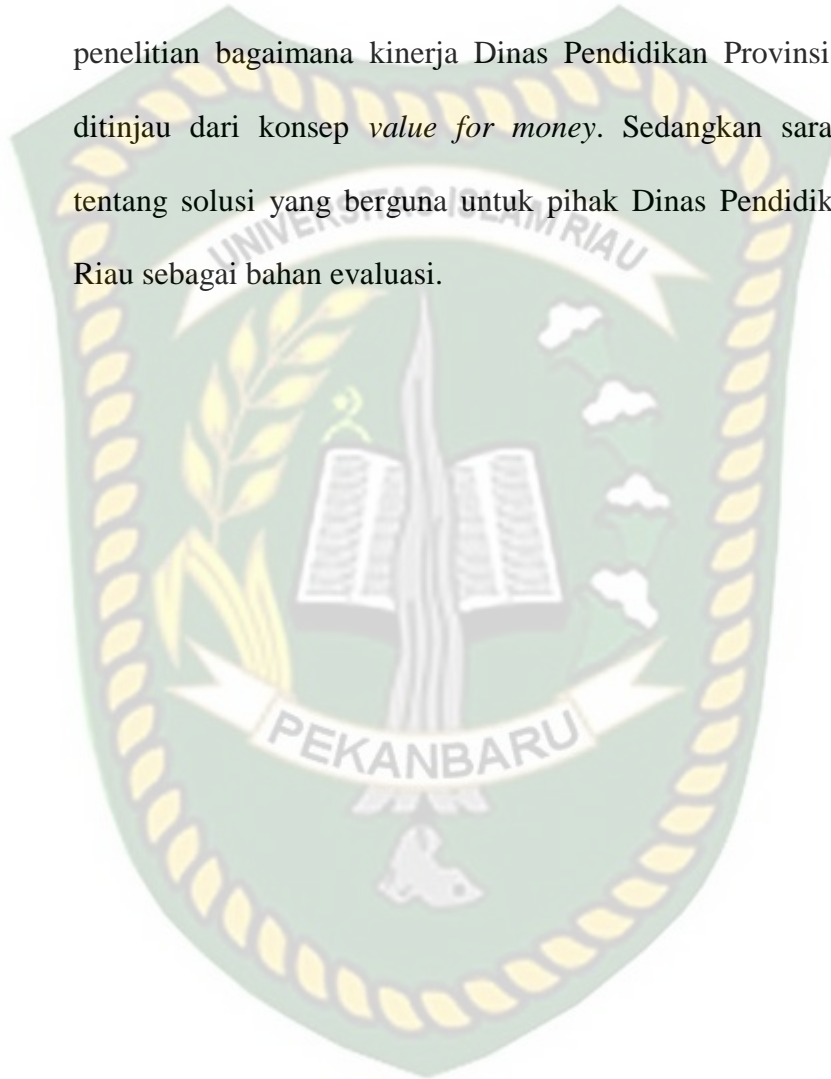
Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan hasil penelitian berupa deskripsi data dan analisis data dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## BAB V :SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Penarikan kesimpulan berisikan tentang hasil analisis yang menjawab permasalahan penelitian bagaimana kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang ditinjau dari konsep *value for money*. Sedangkan saran berisikan tentang solusi yang berguna untuk pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Organisasi Sektor Publik

###### 2.1.1.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik

Dinas Pendidikan merupakan salah satu bentuk dari organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sebagaimana Halim dan Kusufi (2018:11) menjelaskan bahwa:

Istilah sektor publik tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, cukup beralasan bahwa istilah sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Menurut Mardiasmo (2018:3) organisasi sektor publik adalah organisasi yang bergerak dalam aspek lingkungan yang sangat kompleks, diantaranya mencakup faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Sedangkan menurut Bastian (2016:5) organisasi sektor publik didefinisikan sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat.

### 2.1.1.2 Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik

Pratiwi (2016:6) menyatakan bahwa jenis-jenis organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Instansi pemerintah (termasuk pemerintah pusat, dan daerah).
2. Organisasi nirlaba milik pemerintah: (perguruan tinggi BUMN, rumah sakit milik pemerintah, yayasan milik pemerintah, badan layanan umum, badan layanan umum daerah).
3. Organisasi nirlaba milik swasta: yayasan, sekolah atau universitas milik swasta, rumah sakit swasta, partai politik, LSM.

### 2.1.2 Kinerja

#### 2.1.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mahsun (2020:25) kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2018:6) mendefinisikan bahwa kinerja ialah hasil kerja yang berkaitan erat dengan tujuan-tujuan strategi organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Menurut Mardiasmo (2018:152) menyatakan bahwa kinerja sektor publik bersifat multidimensi sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif.

Dengan demikian, kinerja merupakan tingkat prestasi atau tingkat keberhasilan oleh suatu individu atau pun organisasi dalam upaya mencapai tujuan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya secara luas.



### 2.1.2.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Ardilla (2015:82) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah penggambaran keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Menurut Polii (2020:783) kinerja keuangan dalam konteks pemerintah daerah ialah tingkat perolehan atau suatu capaian target kegiatan yang diukur dengan indikator keuangan, kemudian dievaluasi dari hasil sistem pertanggungjawaban yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan dianggap sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam memperoleh pendapatan (Hastthoro, 2016:56). Sehingga kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

### 2.1.2.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan informasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap sasaran yang sudah direncanakan pada suatu program atau kegiatan. Selain itu, indikator kinerja berperan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2018:164).

Menurut Halim dan Kusufi (2018:131), indikator kinerja yang akan dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik, sebagai berikut:

1. Sederhana dan mudah dipahami.
2. Dapat diukur.
3. Dapat dikuantifikasikan.

4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.
5. Berfokus pada pelayanan pelanggan, kualitas dan efisiensi.
6. Dikaji secara teratur.

Menurut Halim dan Kusufi (2018:132-133) mengatakan bahwa indikator kinerja meliputi:

1. Indikator *Input*

*Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output* tertentu. *Input* dibagi menjadi dua, yaitu *input* primer dan sekunder. *Input* primer berupa kas, sedangkan *input* sekunder adalah berupa bahan baku, personel, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu.

2. Indikator *Output*

*Output* adalah hasil langsung (keluaran) dari suatu proses. Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

3. Indikator *Outcome*

*Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat secara luas. *outcome* lebih tinggi nilainya dari *output*, karena *output* hanya mengukur hasil (keluaran) tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *ouput* dan dampak yang dihasilkan. Artinya, *outcome* adalah hasil sesungguhnya yang dicapai dari suatu program dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

### **2.1.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Agustin dan Subarjo (2017:4) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses menilai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menilai tentang penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Mahmudi (2018:12) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik merupakan dasar untuk menilai keberhasilan organisasi sektor publik, yang dimana keberhasilan tersebut digunakan untuk mendapatkan legitimasi, dukungan, dan kepercayaan publik.

Menurut Halim dan Kusufi (2018:124) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Tolak ukur kinerja tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan.

#### **2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Halim dan Kusufi (2018:124) mengemukakan bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan fasilitas pembelajaran bagi pegawai.
3. Meningkatkan kinerja untuk periode berikutnya.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam mengambil keputusan tentang pemberian *reward* dan *punishment*.
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

#### 2.1.4 *Value for Money*

##### 2.1.4.1 Definisi *Value for Money*

Berkaitan dengan definisi *value for money*, Baar & Christie (2015:1-2) mengungkapkan bahwa:

*Value for money is a way of thinking about, and assessing how well public funds are used. Value for money combining aspects of cost and benefit, also conceptually draws on economic appraisal. Value for money thinking in the development field has been evolving over the past decade, which was similarly designed to improve performance, not least through better provision of information on achievement against clearly stated objectives. (Value for Money adalah cara berpikir tentang menilai seberapa baik dana publik digunakan. Value for money menggabungkan biaya dan manfaat, atau secara konseptual disebut dengan penilaian ekonomi. Konsep Value for money telah berkembang selama dekade terakhir, yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, melalui penyediaan yang lebih baik yaitu informasi tentang pencapaian terhadap suatu tujuan).*

Jakupec & Kelly (2016:10) menyatakan bahwa:

*The purpose of Value for money as maximizing the impact to improve people's lives. It an requirement for increased transparency and accountability to achieve the desired quality at the lowest price. Value for money focus increasing a culture of risk-averse, and quantifiable priorities in designing and delivering development aid. (Tujuan value for money ialah memaksimalkan dampak untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Tuntutan tersebut, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai kualitas yang diinginkan*



dengan harga terendah. *Value for money* juga fokus untuk meningkatkan budaya menghindari risiko, dan prioritas terukur dalam merancang dan memberikan bantuan pembangunan).

Menurut Halim dan Kusufi (2018:128): “*Value for money* adalah konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi”. Menurut Mardiasmo (2018:160): “*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja organisasi sektor pemerintah”. Mahmudi (2018:81) menyatakan bahwa *value for money* memiliki arti yaitu penghargaan terhadap nilai uang. Artinya, setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Pratiwi (2016:7) mengungkapkan bahwa *value for money* ialah tolak ukur yang merupakan kombinasi dari *input*, *output*, dan *outcome*. Permasalahan yang sering dihadapi adalah pengukuran terhadap *output* dan *outcome*.

#### **2.1.4.2 Konsep *Value for Money***

*Value for money* merupakan kebutuhan setiap organisasi sektor publik agar dapat beroperasi secara optimal dan berkesinambungan (Bastian, 2016:8). *Value for money* adalah suatu konsep pengelolaan kinerja organisasi sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018:3). Penjelasan dari masing-masing elemen tersebut secara lebih lengkap sebagai berikut:

1. Ekonomi, Mardiasmo (2018:3) mengartikan bahwa ekonomi merupakan ekonomi adalah perolehan sumber daya (*input*) tertentu dengan harga terendah. Ekonomi adalah perbandingan *input* dengan nilai *input* yang

dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan sumber daya *input* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi, Efisiensi diartikan sebagai penggunaan *input* yang minimal dengan pencapaian *output* yang optimal. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dan *input* yang dihubungkan dengan target atau standar kerja yang telah ditetapkan (Pratiwi, 2016:7).
3. Efektivitas, Efektivitas terkait dengan menilai seberapa jauh tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif (Mardiasmo, 2018:168). Menurut Pratiwi (2016:7): “Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau dengan kata lain merupakan perbandingan *outcome* dan *output*”.

#### 2.1.4.3 Indikator *Value for Money*

Indikator bertujuan untuk memberikan ukuran atau gambaran pencapaian program secara pasti. Mardiasmo (2018:165-166) mengemukakan bahwa pengembangan indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator Alokasi Biaya (ekonomis dan efisiensi)

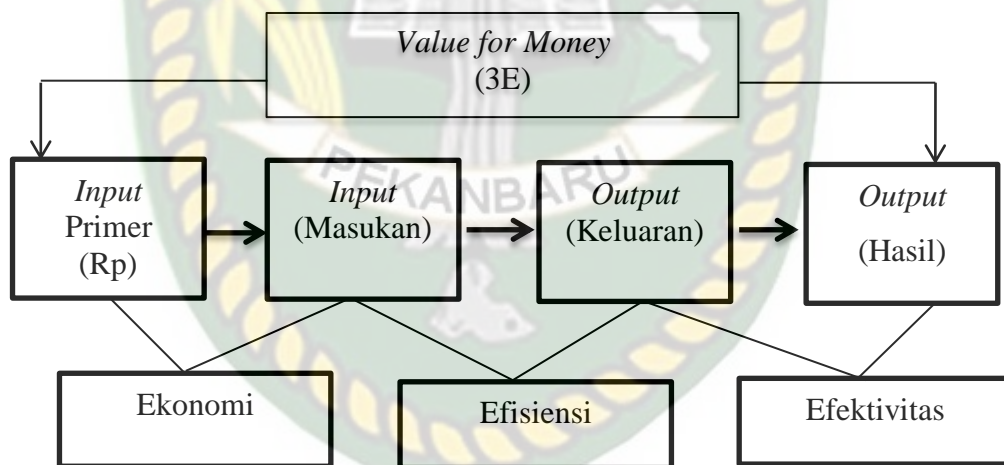
Ekonomis adalah proses pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik (*spending less*). Ekonomi meliputi pengelolaan sumber daya masukan dengan hati-hati atau cermat (*prudency*) dan

tidak ada pemborosan. Efisiensi adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai dengan penggunaan sumber dana serendah mungkin (*spending well*).

## 2. Indikator Kualitas Pelayanan (efektivitas)

Efektivitas yaitu kontribusi antara keluaran (*output*) dengan pencapaian sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Kegiatan suatu organisasi dapat dinilai efektif apabila proses (*output*) yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas menggambarkan dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari *output* untuk mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan, maka semakin efektif program suatu organisasi.

**Gambar 2. 1**  
**Value for Money Chain**



(Sumber : Buku Mahmudi "Manajemen Kinerja Sektor Publik" Tahun 2018)

### 2.1.4.4 Manfaat Implementasi Value for Money

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan banyak manfaat, maka dari itu penerapan *value for money* sangat penting.

Mahsun (2020:186) mengemukakan bahwa manfaat *value for money* sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Mampu menciptakan biaya pelayanan publik yang murah, dengan menghilangkan segala bentuk inefisiensi dan melakukan penghematan *input*.
4. Alokasi belanja yang lebih berfokus pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

#### **2.1.5 Akuntabilitas**

Akuntabilitas dipandang sebagai salah satu isu penting dalam praktik organisasi sektor publik. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa (tujuan) organisasi bertanggungjawab (Mahsun, 2020:83). Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya (Wicaksono, 2015:4).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2012 menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Maka dapat disimpulkan,



akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi atau organisasi pemerintah dalam mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **2.1.6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Agustin dan Subarjo (2017:7) menguraikan fungsi LAKIP, sebagai berikut:

1. Sarana hubungan kerja organisasi yang berfungsi sebagai wadah pengolahan informasi dan data.
2. Bentuk pertanggungjawaban tertulis suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan amanah, sehingga LAKIP juga berfungsi sebagai laporan dari pimpinan unit organisasi.
3. LAKIP memuat kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.
4. Sebagai media informasi sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) diterapkan, termasuk penerapan fungsi manajemen yang benar pada instansi terkait.

Dalam penyusunannya, LAKIP bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menanggapi tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan amanah yang diterima instansi pemerintah tersebut.

### 2.1.7 Anggaran

Anggaran dalam sektor publik juga disebut sebagai anggaran publik yang merujuk pada anggaran pemerintah. APBD adalah ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran sektor publik ialah proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program-program atau aktivitas yang akan dilaksanakan. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Ruhmaini *et al.*, (2018:34) menyatakan bahwa:

Serapan belanja adalah besarnya anggaran yang telah digunakan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyerapan anggaran yang tinggi berarti tidak banyak sisa anggaran di akhir tahun. Artinya, penyerapan anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian (ketepatan) perencanaan anggaran atau kualitas anggaran.

Halim dan Kusufi (2018:48) mengemukakan bahwa anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya.
3. Mengalokasikan dana pada berbagai macam program dan kegiatan yang telah disusun, dan
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Yosie Dwinanda (2018)	Analisis <i>Value for Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Deskriptif komparatif	kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari seluruh kegiatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kinerja yang ekonomis, cukup efisien, dan kurang efektif.
2	Nur Zeni Amilia Putri (2020)	Analisis <i>Value for Money</i> Pada Kinerja Keuangan Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur	Deskriptif kualitatif	<p>1) Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada program kesehatan masyarakat dan program perbaikan gizi masyarakat tahun 2016 dan 2017 sudah sangat baik, kecuali pada program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan yang dikategorikan baik.</p> <p>2) Pada tahun 2018 hanya program perbaikan gizi yang sangat baik dan penggunaan anggaran dari tahun 2016 – 2018 dinyatakan efisien.</p> <p>3) Analisis value for money pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap program kesehatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, dan program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan dari tahun 2016 – 2018 dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang efektif</p>

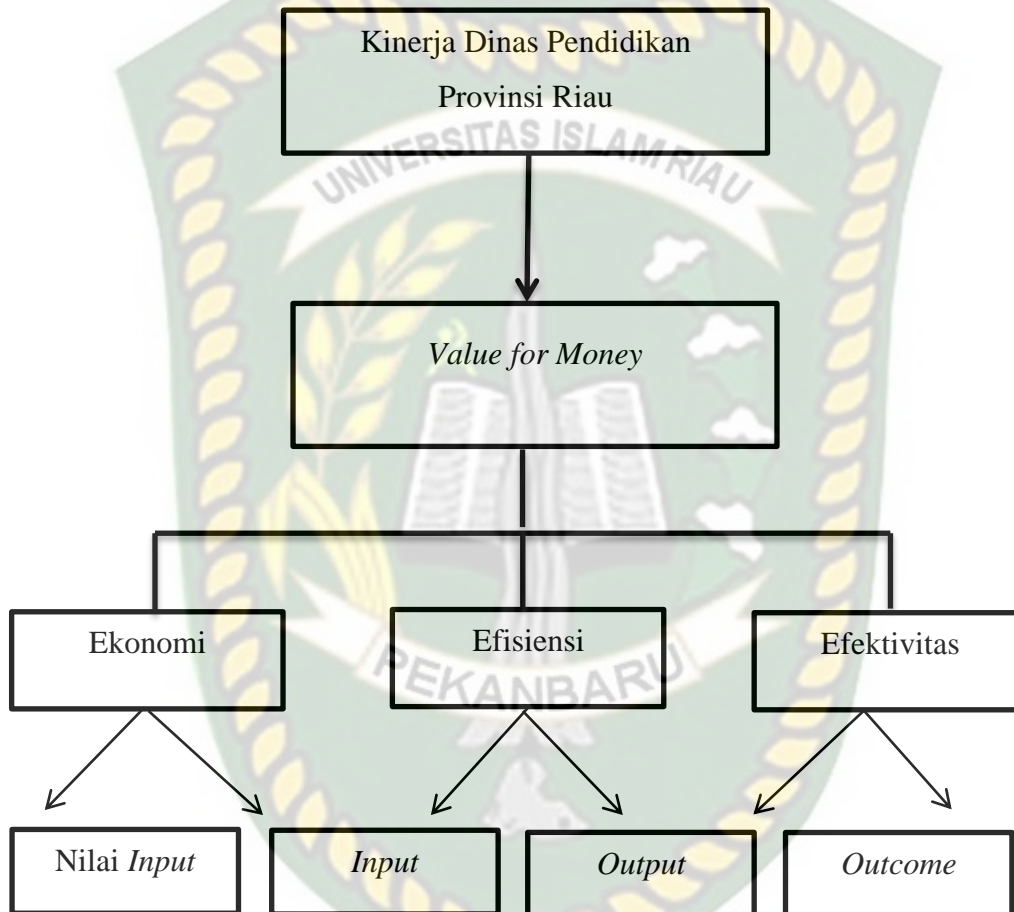
**Tabel 2.1**  
**Lanjutan**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
3	Novia Nurdia Ningsih, Siti Masyithoh, dan Ibnu Abni Lahaya (2017)	Analisis Kinerja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan <i>Value for Money</i>	Deskriptif kualitatif	<p>1) Dari hasil perhitungan analisis Kertas Penilaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diperoleh nilai ekonomi sebesar 89%. Sehingga dikategorikan ekonomis.</p> <p>2) Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efisiensi pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan diketahui bahwa untuk periode tahun 2014 program kegiatan ini dapat dikatakan efisien, yaitu diperoleh nilai efisiensi sebesar 130%.</p> <p>3) Rasio efektivitas yang dihasilkan oleh kegiatan ini pada periode tahun 2014 menurut Kertas Kerja Penilaian Value For Money adalah 96,55%. Sehingga dikategorikan tidak efektif.</p>



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2  
Kerangka Pemikiran



### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah diuraikan, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut: **Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum sesuai dengan Prinsip *Value for Money*.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan kegiatan dan dampak dari kegiatan yang dilakukan secara naratif (Anggito dan Setiawan, 2018:7). Menurut Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang (*human instrument*), yakni peneliti itu sendiri.

Menurut Hermawan (2019:100) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yang mana proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena dari permasalahan yang akan diangkat ke dalam penelitian secara tekstual, yang mana peneliti menjadi instrumen kunci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Urusan Wajib jika diukur atau dianalisis menggunakan konsep *value for money*, dengan cara mengumpulkan,

mengolah, dan menyajikan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi rincian program dan alokasi anggaran program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas bagi peneliti untuk menganalisis objek penelitian yang akan diteliti.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Urusan Wajib, yaitu Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

### **3.3 Definisi Variabel Penelitian**

Definisi variabel penelitian merupakan penjelasan tentang cara peneliti mengukur atau menghitung variabel meliputi rumus dari indikator-indikator yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggunakan metode *value for money*. Adapun indikator-indikator dari metode *value for money* adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Ekonomi**

Pengukuran ekonomi merupakan pengukuran yang bersifat relatif. Ekonomi terkait dengan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan masukan (yang seharusnya). Artinya, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Halim dan Kusufi (2018:129)

menyatakan bahwa apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sebaliknya apabila di atas anggaran, maka terjadi pemborosan. Menurut Mahsun (2020:186) menyatakan bahwa pengukuran ekonomi membutuhkan data-data anggaran dan realisasinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik. Berikut Rumus untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomi menurut Mahsun (2020:186) adalah:

- a. Apabila memperoleh hasil kurang dari 100% (< 100%) maka dinyatakan ekonomis.
- b. Apabila memperoleh hasil sama dengan 100% (= 100%) maka dinyatakan ekonomi berimbang.
- c. Apabila memperoleh hasil lebih dari 100% (> 100%) maka dinyatakan tidak ekonomis.

### 3.3.2 Efisiensi

Halim dan Kusufi (2018:129) menyatakan bahwa proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Mardiasmo (2018:167) menyatakan bahwa apabila semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Menurut Mahsun (2020:187) efisiensi ialah mengukur tingkat



*input* terhadap tingkat *output* pada organisasi sektor publik. Dalam penelitian ini, indikator *input* berupa capaian anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Kemudian, untuk indikator *output* berupa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Sehingga rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam penelitian ini ialah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Capaian Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi menurut Mahsun (2020:187) adalah:

- a. Apabila memperoleh hasil kurang dari 100% (< 100%) maka dinyatakan tidak efisien.
- b. Apabila memperoleh hasil sama dengan 100% (= 100%) maka dinyatakan efisiensi berimbang.
- c. Apabila memperoleh hasil lebih dari 100% (> 100%) berarti dinyatakan efisien.

### 3.3.3 Efektivitas

Efektivitas menilai apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Mahsun (2020:187) efektivitas merupakan mengukur tingkat *output* organisasi sektor publik terhadap target-target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini,

yang menjadi indikator *output* adalah hasil atau realisasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Sehingga rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini ialah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas menurut Mahsun (2020:187) adalah:

- a. Apabila diperoleh nilai kurang dari 100% (< 100%) maka dinyatakan tidak efektif.
- b. Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% (= 100%) maka dinyatakan efektivitas berimbang.
- c. Apabila diperoleh nilai lebih dari 100% (> 100%) berarti efektif.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) periode tahun 2018 dan 2019, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018 dan 2019.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 2017:130). Data

sekunder dalam Penelitian ini adalah berupa literatur, jurnal, buku, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan analisis *value for money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang dalam penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

#### **3.5.1 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau periode tahun 2018 dan 2019, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018 dan 2019.

#### **3.5.2 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan referensi atau teori-teori dasar yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi atau referensi tersebut diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan analisis *value for money* pada pengukuran kinerja sektor publik.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memvalidasi fenomena yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian yaitu kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diteliti menggunakan teori atau konsep *value for money*. Pada tahap awal penelitian, dilakukannya pengumpulan data berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kemudian data diolah dan dihitung atau dianalisis dengan indikator *Value for Money* untuk mendapatkan mengenai gambaran bagaimana kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hasil perhitungan yang diperoleh kemudian dijabarkan dalam bentuk kata-kata (tekstual) untuk menjelaskan makna dari angka-angka yang telah diperoleh dari hasil perhitungan tersebut.

Sugiyono (2015:337-345) menyatakan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan ketiga bagian tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu berfokus pada hal-hal penting dan mengelola data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada data rincian program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Penyajian data, dalam penelitian ini penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian ini, penyajian data berupa analisis pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau ditinjau menggunakan konsep atau teori *value for money*.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat dan Profil Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dalam bidang pendidikan, serta melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2015, Dinas Pendidikan bergabung dengan Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berubah kembali menjadi Dinas Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Riau. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibagi kembali menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dengan tugas pokok Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Riau beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 03 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jumlah sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebesar 7.935 orang, yang terdiri dari jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 7.774 orang, jabatan staf sebanyak 161 orang, dan jabatan struktural sebanyak 25 orang.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

Mengacu pada keinginan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk ikut bergerak dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memfokuskan pada permasalahan dan tantangan pembangunan, serta isu-isu strategis yang dihadapi, maka visi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dirumuskan: “Terwujudnya Layanan Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang Berdaya Saing”. Terwujudnya visi tersebut, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua unsur yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan atau mencapai visi tersebut, maka perlu didukung dengan adanya misi yang sejalan dengan visi yang sudah dirumuskan. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu “Meningkatkan Layanan Pendidikan”.

#### **4.1.3 Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Riau menurut revisi Renstra tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dengan strategi peningkatan akses pelayanan pendidikan dan mutu pendidikan.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut revisi Renstra Dinas Pendidikan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.
2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan.
3. Meningkatkan kesesuaian layanan pendidikan dengan lapangan pekerja.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pendidikan.
5. Meningkatkan tata kelola manajemen layanan pendidikan.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

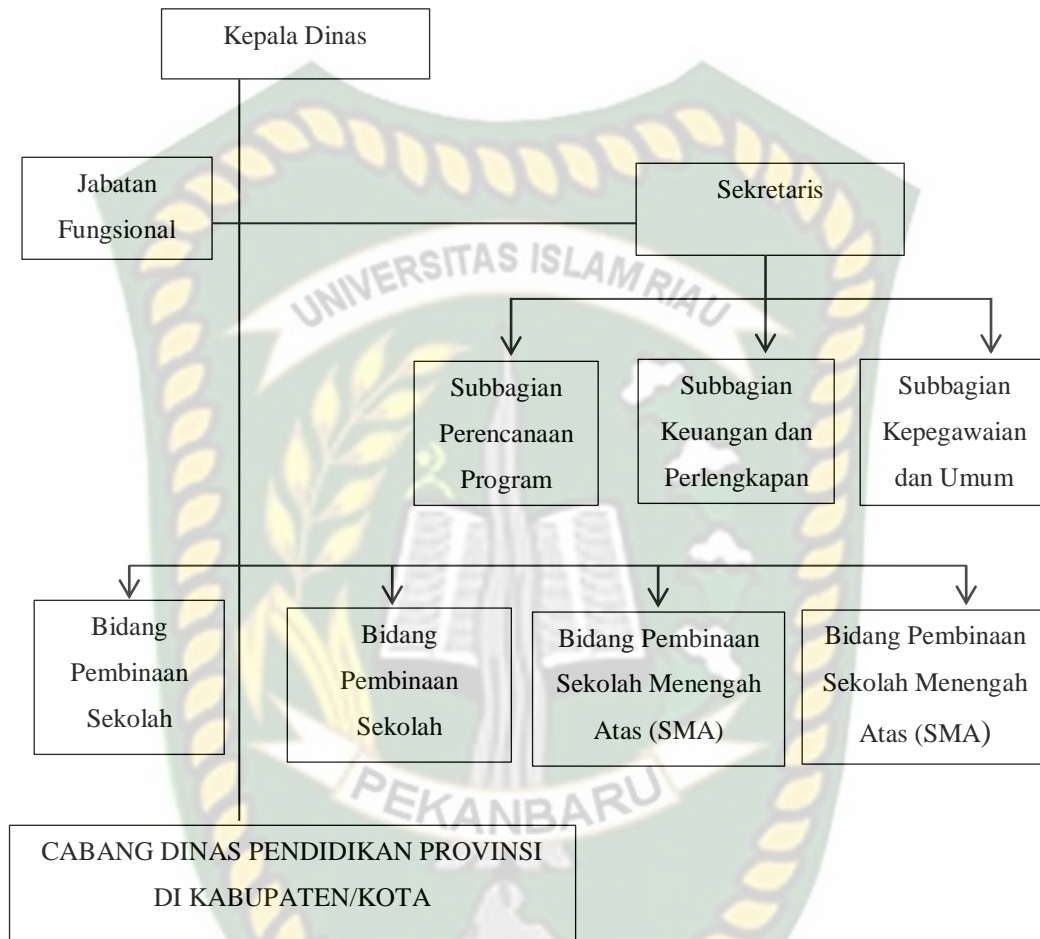
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Perencanaan Program
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum
  - c. Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik.
  - b. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik.
  - b. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik.
  - b. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
6. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidik, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Data Pendidikan.
  - b. Seksi Pengembangan Kebijakan Pendidikan.
  - c. Seksi Tugas Pembantuan, Fasilitasi, dan Kerjasama Pendidikan.



**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau**



Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019

#### 4.2 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengukur kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, menggunakan metode pengukuran kinerja *Value for Money*. *Value for Money* merupakan metode pengukuran kinerja yang berlandaskan pada tiga indikator, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

#### 4.2.1 Perhitungan Ekonomi

Rumus mengukur tingkat ekonomi (Mahsun, 2020:186):

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomi menurut Mahsun (2020:186) adalah:

1. < 100% maka dinyatakan ekonomis,
2. = 100% maka dinyatakan ekonomi berimbang,
3. >100% maka dinyatakan tidak ekonomis.

Berikut perhitungan ekonomi Program Pendidikan Menengah pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{37.351.308.035,00}{47.986.636.000,00} \times 100\% \\ &= 77,84\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan ekonomi pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA Program Pendidikan Menengah tahun 2018 diperoleh sebesar 77,84%, sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dikategorikan ekonomis.

Analisis perhitungan ekonomi untuk seluruh kegiatan pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, pada tahun 2018 dan tahun 2019, akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1**  
**Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Menengah Tahun 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
1	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMA	945.002.362,00	23.966.996.000,00	3,94%	Ekonomis
2	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	37.351.308.035,00	47.986.636.000,00	77,84%	Ekonomis
3	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	16.094.558.733,00	30.914.000.000,00	52,06%	Ekonomis
4	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	754.212.606,00	778.409.000,00	96,89%	Ekonomis
5	Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	142.244.150,00	196.300.200,00	72,46%	Ekonomis
6	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	470.616.000,00	484.572.800,00	97,12%	Ekonomis
7	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	413.414.500,00	496.254.600,00	83,31%	Ekonomis
8	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan / Bos Daerah	235.922.028.400,00	236.483.982.600,00	99,76%	Ekonomis
9	PPDB On Line SMA/SMK	-	500.000.000,00	0,00%	Ekonomis
10	Peningkatan Infrastruktur SMK	3.820.572.100,00	5.396.666.666,67	70,80%	Ekonomis
11	Pembangunan Pagar SMA	2.933.238.800,00	10.283.480.000,00	28,52%	Ekonomis
12	Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	1.595.140.532,00	1.671.862.000,00	95,41%	Ekonomis
13	Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	18.002.800,00	489.958.000,00	3,67%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.1**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
14	Pembangunan Pagar SMK	3.630.007.700,00	3.873.000.000,00	93,73%	Ekonomis
15	Pembangunan Perpustakaan	1.909.100,00	999.880.000,00	0,19%	Ekonomis
16	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	1.508.374.300,00	1.759.319.300,00	85,74%	Ekonomis
17	Peningkatan Infrastruktur SMA	1.913.427.900,00	8.124.766.000,00	23,55%	Ekonomis
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	10.386.000,00	2.999.880.000,00	0,35%	Ekonomis
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	8.212.990.610,00	28.854.537.510,50	28,46%	Ekonomis
20	Pengadaan Alat Kesenian SMA	189.849.600,00	196.802.000,00	96,47%	Ekonomis
21	Pengadaan Alat Labor SMK	57.987.200,00	1.168.450.500,00	4,96%	Ekonomis
22	Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya	238.740.680,00	30.640.044.000,00	0,78%	Ekonomis
23	Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	72.951.800,00	1.720.858.000,00	4,24%	Ekonomis
24	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	14.820.114.250,00	16.985.574.000,00	87,25%	Ekonomis
25	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMA	2.415.799.886,00	5.166.032.000,00	46,76%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021



**Tabel 4.1**  
**Lanjutan**

No	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
26	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	44.962.700,00	1.477.863.700,00	3,04%	Ekonomis
27	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	1.517.532.650,00	4.056.000.000,00	37,41%	Ekonomis
28	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	-	2.939.110.000,00	0,00%	Ekonomis
29	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	32.343.037.660,00	33.208.970.000,00	97,39%	Ekonomis
30	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	32.937.724.942,00	39.816.043.000,00	82,72%	Ekonomis
	<b>JUMLAH</b>	<b>400.376.135.996,00</b>	<b>543.636.247.877,17</b>	<b>73,65%</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4. 2**  
**Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Menengah Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	1.076.554.788,00	1.100.000.000,00	97,87%	Ekonomis
2	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	239.011.975,00	458.775.675,00	52,10%	Ekonomis
3	Revitalisasi SMA	30.000.000,00	2.658.039.600,00	1,13%	Ekonomis
4	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK	21.182.600,00	3.846.247.000,00	0,55%	Ekonomis
5	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SMA	335.344.300,00	5.775.835.400,00	5,81%	Ekonomis
6	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	1.339.766.100,00	1.836.840.050,00	72,94%	Ekonomis
7	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	4.749.591.698,00	5.053.000.000,00	94,00%	Ekonomis
8	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA	408.907.800,00	557.391.450,00	73,36%	Ekonomis
9	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA	383.646.400,00	402.446.300,00	95,33%	Ekonomis
10	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	368.104.600,00	413.700.400,00	88,98%	Ekonomis
11	Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	32.460.800,00	852.446.200,00	3,81%	Ekonomis
12	Rehabilitasi SMA/SMK	955.721.100,00	1.035.742.400,00	92,27%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.2**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
13	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	117.481.300,00	268.848.400,00	43,70%	Ekonomis
14	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	987.799.553,00	1.173.547.000,00	84,17%	Ekonomis
15	Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK	314.415.900,00	358.178.000,00	87,78%	Ekonomis
16	Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA	472.771.200,00	576.850.000,00	81,96%	Ekonomis
17	Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA	353.273.500,00	400.000.000,00	88,32%	Ekonomis
18	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	721.919.700,00	791.426.500,00	91,22%	Ekonomis
19	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	353.209.700,00	435.923.500,00	81,03%	Ekonomis
20	Pelatihan Pendidikan Tata Kelola Administrasi SMK	290.654.000,00	327.494.000,00	88,75%	Ekonomis
21	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan / BOS Daerah	238.827.044.412,00	250.170.067.400,00	95,47%	Ekonomis
22	Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknik	1.094.225.842,00	2.566.833.500,00	42,63%	Ekonomis
23	Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif Menjadi Guru Produktif Kerjasama dengan UNRI/UIN/UNAND/UNP	14.800.000,00	1.000.000.000,00	1,48%	Ekonomis
24	Peningkatan Infrastruktur SMK	2.826.360.650,00	6.081.000.000,00	46,48%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.2**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
25	Diklat Kepala Sekolah SMA	465.164.100,00	573.969.900,00	81,04%	Ekonomis
26	Pembangunan Pagar SMA	1.645.160.100,00	1.727.585.200,00	95,23%	Ekonomis
27	Pembangunan Perpustakaan SMK	91.227.600,00	862.418.500,00	10,58%	Ekonomis
28	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	4.097.083.700,00	5.293.489.800,00	77,40%	Ekonomis
29	Peningkatan Infrastruktur SMA	3.036.882.225,73	6.474.140.000,00	46,91%	Ekonomis
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	12.800.000,00	2.229.160.160,00	0,57%	Ekonomis
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	4.392.090.933,00	4.926.300.000,00	89,16%	Ekonomis
32	Pengadaan Alat Labor SMK	47.970.500,00	2.671.984.300,00	1,80%	Ekonomis
33	Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00%	Ekonomi Berimbang
34	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	193.758.800,00	4.015.668.600,00	4,83%	Ekonomis
35	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SMK dan Kelengkapannya	125.603.900,00	2.546.659.310,00	4,93%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021



**Tabel 4.2**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
36	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	2.108.157.400,00	2.500.000.000,00	84,33%	Ekonomis
37	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	28.120.428.095,40	28.593.954.000,00	98,34%	Ekonomis
38	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	90.289.821.356,00	94.644.469.000,00	95,40%	Ekonomis
39	Diklat Kepala Sekolah SMK	572.035.942,00	700.000.000,00	81,72%	Ekonomis
40	Pembangunan Auditorium SMK / Gedung Serbaguna SMK	104.912.000,00	1.250.000.000,00	8,39%	Ekonomis
41	Sertifikasi Keahlian bagi Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi	1.526.515.200,00	1.750.000.000,00	87,23%	Ekonomis
42	Penyelenggaraan Pendidikan SLB (DAK)	7.223.685.898,00	7.446.529.000,00	97,01%	Ekonomis
<b>JUMLAH</b>		<b>400.381.745.668,13</b>	<b>456.361.160.545,00</b>	<b>87,73%</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis data mengenai perhitungan ekonomi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 30 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018**  
**Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ekonomis	30	100
Ekonomi Berimbang	0	0
Tidak ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	30	100

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 42 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 4**  
**Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019**  
**Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ekonomis	41	97,62
Ekonomi Berimbang	1	2,38
Tidak ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	42	100

*Sumber: Data diolah, 2021*

**Tabel 4. 5**  
**Perhitungan Ekonomi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
1	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	473.939.700,00	576.346.400,00	82,23%	Ekonomis
2	Pengadaan Kalender Pendidikan	277.827.600,00	295.367.000,00	94,06%	Ekonomis
3	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik, dan Kependidikan Berprestasi Se-Provinsi Riau	437.798.000,00	489.988.000,00	89,35%	Ekonomis
4	Pengelolaan Data Pendidikan	313.190.700,00	1.086.777.100,00	28,82%	Ekonomis
5	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	199.711.000,00	250.000.000,00	79,88%	Ekonomis
6	Verifikasi, Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Program / Kegiatan, Bantuan Hibah, dan Bantuan Keuangan	794.559.800,00	826.167.230,00	96,17%	Ekonomis
7	Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	468.966.700,00	847.866.000,00	55,31%	Ekonomis
8	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	1.003.202.200,00	1.282.048.600,00	78,25%	Ekonomis
9	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	1.116.949.900,00	1.382.341.500,00	80,80%	Ekonomis
10	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	1.034.457.467,00	1.277.278.000,00	80,99%	Ekonomis
11	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	920.249.175,00	1.085.453.600,00	84,78%	Ekonomis
12	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	619.306.300,00	832.632.800,00	74,38%	Ekonomis
13	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	685.337.400,00	840.883.600,00	81,50%	Ekonomis
14	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	16.344.051.200,00	24.247.268.350,00	67,41%	Ekonomis
15	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	3.323.194.752,00	8.401.747.100,00	39,55%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.5**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
16	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	8.321.246.000,00	9.100.000.000,00	91,44%	Ekonomis
17	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	1.369.533.600,00	1.580.524.000,00	86,65%	Ekonomis
18	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	2.573.942.800,00	2.675.505.000,00	96,20%	Ekonomis
19	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1.701.690.959,00	1.955.452.300,00	87,02%	Ekonomis
20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	1.213.935.500,00	1.666.735.300,00	72,83%	Ekonomis
21	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	867.677.350,00	1.260.097.100,00	68,86%	Ekonomis
22	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	257.867.002,00	590.087.800,00	43,70%	Ekonomis
23	Kualifikasi S2 Terakreditasi	3.600.248.700,00	6.066.706.000,00	59,34%	Ekonomis
24	Pembinaan Olahraga dan Seni ( <i>Marching Band</i> ) SMA/SMK Provinsi Riau	29.027.600,00	588.265.600,00	4,93%	Ekonomis
25	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Mading Digital Interaktif	-	162.000.000,00	0,00%	
26	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA / SMK	90.600.000,00	93.216.800,00	97,19%	Ekonomis
27	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	55.164.000,00	98.947.000,00	55,75%	Ekonomis
28	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	96.418.100,00	1.433.904.400,00	6,72%	Ekonomis
29	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD / SMP dan Ujian Paket A / B / C	-	670.196.050,00	0,00%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.190.093.505,00</b>	<b>71.663.802.630,00</b>	<b>67,24%</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber: Data diolah, 2021



**Tabel 4. 6**  
**Perhitungan Ekonomi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
1	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	703.416.800,00	915.058.100,00	76,87%	Ekonomis
2	Diklat Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembelajaran	692.897.900,00	735.925.200,00	94,15%	Ekonomis
3	Pengadaan Kalender Pendidikan	254.354.749,00	273.920.000,00	92,86%	Ekonomis
4	Pemberian Penghargaan kepada Siswa, Tenaga Pendidik, dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	476.320.500,00	500.000.000,00	95,26%	Ekonomis
5	Pengelolaan Data Pendidikan	1.083.926.750,00	1.641.893.700,00	66,02%	Ekonomis
6	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	134.867.000,00	138.914.500,00	97,09%	Ekonomis
7	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah	709.728.650,00	755.000.050,00	94,00%	Ekonomis
8	Verifikasi, Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Program / Kegiatan, Bantuan Hibah, dan Bantuan Keuangan	670.550.900,00	775.483.000,00	86,47%	Ekonomis
9	Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	815.344.100,00	924.689.600,00	88,17%	Ekonomis
10	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	766.649.998,00	820.710.700,00	93,41%	Ekonomis
11	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	919.287.548,00	969.604.000,00	94,81%	Ekonomis
12	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	1.063.109.875,00	1.118.848.000,00	95,02%	Ekonomis
13	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	727.910.700,00	780.400.800,00	93,27%	Ekonomis
14	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	745.455.900,00	800.180.000,00	93,16%	Ekonomis
15	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	709.416.000,00	765.872.800,00	92,63%	Ekonomis
16	Beasiswa Tamatan SLTA pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	18.803.746.600,00	27.209.733.600,00	69,11%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.6**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
17	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	5.078.650.584,00	10.339.976.500,00	49,12%	Ekonomis
18	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	7.202.770.000,00	9.000.000.000,00	80,03%	Ekonomis
19	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	1.762.686.000,00	1.880.524.000,00	93,73%	Ekonomis
20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	2.340.622.900,00	2.650.357.200,00	88,31%	Ekonomis
21	Debat Bahasa Inggris SMA	408.335.000,00	451.293.900,00	90,48%	Ekonomis
22	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1.621.900.400,00	1.868.425.800,00	86,81%	Ekonomis
23	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	1.573.412.700,00	1.994.000.000,00	78,91%	Ekonomis
24	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	1.263.421.800,00	1.500.000.000,00	84,23%	Ekonomis
25	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	391.136.400,00	444.078.000,00	88,08%	Ekonomis
26	Kualifikasi S2 Terakreditasi	3.794.141.350,00	5.630.299.950,00	67,39%	Ekonomis
27	Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	1.507.927.700,00	1.858.334.100,00	81,14%	Ekonomis
28	Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Pelaporan BOS Se-Provinsi Riau	1.003.331.240,00	1.053.288.200,00	95,26%	Ekonomis
29	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA / SMK	352.648.400,00	930.376.600,00	37,90%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.6**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
30	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	75.837.000,00	75.837.000,00	100,00%	Ekonomi Berimbang
31	Pencapaian SPM Pendidikan dan Pemantauan / Evaluasi SPM Pendidikan di Provinsi dan Kab / Kota	732.398.400,00	750.000.000,00	97,65%	Ekonomis
32	Diklat Muatan Lokal bagi Guru SMA / SMK Se-Provinsi Riau	598.250.000,00	700.000.000,00	85,46%	Ekonomis
	<b>JUMLAH</b>	<b>58.984.453.844,00</b>	<b>80.253.025.300,00</b>	<b>73,50%</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis data mengenai perhitungan ekonomi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 29 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 7**  
**Jumlah Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ekonomis	29	100
Ekonomi Berimbang	0	0
Tidak Ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	29	100

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 32 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 8**  
**Jumlah kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ekonomis	31	96,88
Ekonomi Berimbang	1	3,12
Tidak Ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	32	100

*Sumber: Data diolah, 2021*



**Tabel 4. 9**  
**Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	449.083.327,00	923.200.000,00	48,64%	Ekonomis
2	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB, dan SMALB	517.848.200,00	573.632.200,00	90,28%	Ekonomis
3	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	1.826.712.450,00	1.947.968.930,00	93,78%	Ekonomis
4	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1.139.111.338,00	1.275.250.000,00	89,32%	Ekonomis
5	Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	26.985.000,00	400.000.000,00	6,75%	Ekonomis
6	Pengadaan Meubiler SLB	43.080.000,00	1.763.000.000,00	2,44%	Ekonomis
7	Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	242.494.300,00	250.000.000,00	97,00%	Ekonomis
8	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	5.420.839.593,00	5.496.439.000,00	98,62%	Ekonomis
9	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	5.737.535.662,00	6.024.000.000,00	95,24%	Ekonomis
10	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	3.780.822.162,00	4.478.960.600,00	84,41%	Ekonomis
11	Festival Inovasi dan Kreatifitas PKPLK	526.907.200,00	539.857.200,00	97,60%	Ekonomis
12	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	4.921.347.500,00	5.697.300.000,00	86,38%	Ekonomis
13	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	2.691.813.824,00	3.489.000.000,00	77,15%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.9**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
14	Penyelenggaraan SMA Pintar	4.318.153.761,00	4.987.836.000,00	86,57%	Ekonomis
15	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	4.719.964.600,00	4.773.422.000,00	98,88%	Ekonomis
16	Apresiasi GTK PAUD DIKMAS dan Guru Berprestasi serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	773.965.600,00	827.807.600,00	93,50%	Ekonomis
17	Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	382.374.200,00	442.625.700,00	86,39%	Ekonomis
<b>JUMLAH</b>		<b>37.519.038.717,00</b>	<b>43.890.299.230,00</b>	<b>85,48%</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4. 10**  
**Perhitungan Ekonomi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
1	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB, dan SMALB	426.775.100,00	486.955.300,00	87,64%	Ekonomis
2	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	2.142.242.300,00	2.269.995.400,00	94,37%	Ekonomis
3	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1.242.935.200,00	1.275.250.000,00	97,47%	Ekonomis
4	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PKPLK	1.338.893.600,00	1.490.000.000,00	89,86%	Ekonomis
5	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK	1.178.337.316,00	1.259.000.000,00	93,59%	Ekonomis
6	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	5.403.453.585,00	6.553.129.000,00	82,46%	Ekonomis
7	Pengadaan Meubiler PKPLK	18.273.000,00	1.324.400.000,00	1,38%	Ekonomis
8	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	6.231.909.918,00	7.107.403.000,00	87,68%	Ekonomis
9	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	3.507.900.255,00	4.460.960.600,00	78,64%	Ekonomis
10	Festival Inovasi dan Kreatifitas PKPLK	650.208.400,00	711.842.000,00	91,34%	Ekonomis
11	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	5.141.305.700,00	6.042.300.000,00	85,09%	Ekonomis
12	Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	585.441.300,00	758.196.800,00	77,21%	Ekonomis
13	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKPLK	2.493.110.800,00	2.671.273.600,00	93,33%	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.10**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Keterangan
14	Penyelenggaraan SMA Pintar	4.290.051.400,00	4.837.836.000,00	88,68%	Ekonomis
15	Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat	235.015.500,00	300.000.000,00	78,34%	Ekonomis
16	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	5.355.641.000,00	5.453.991.000,00	98,20%	Ekonomis
17	Penyelenggaraan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Bagi Daerah 3T dan KAT Provinsi Riau	187.116.300,00	189.339.500,00	98,83%	Ekonomis
18	Apresiasi GTK PAUD DIKMAS dan Guru Berprestasi serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	975.941.600,00	1.027.807.600,00	94,95%	Ekonomis
19	Diklat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	175.700.000,00	220.000.000,00	79,86%	Ekonomis
20	Kegiatan DAK Non Fisik Afirmasi (DAK)	3.041.633.990,00	19.816.000.000,00	15,35%	Ekonomis
21	Kegiatan DAK Non Fisik Kinerja (DAK)	60.978.200,00	15.800.000.000,00	0,39%	Ekonomis
<b>JUMLAH</b>		<b>44.682.864.464,00</b>	<b>84.055.679.800,00</b>	<b>53,16%</b>	<b>Ekonomis</b>

Sumber: Data diolah, 2021



Hasil analisis data mengenai perhitungan ekonomi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 17 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 11**  
**Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

Kategori	Jumlah Kegiatan	Persentase (%)
Ekonomis	17	100
Ekonomi Berimbang	0	0
Tidak Ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	17	100

Sumber: Data diolah, 2021

2. Pada tahun 2019, terdapat 21 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus , yang terdiri atas:

**Tabel 4. 12**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

Kategori	Jumlah Kegiatan	Persentase (%)
Ekonomis	21	100
Ekonomi Berimbang	0	0
Tidak Ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	21	100

Sumber: Data diolah, 2021

#### 4.2.2 Perhitungan Efisiensi

Rumus mengukur tingkat efisiensi ialah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Capaian Anggaran}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria, menurut Mahsun (2020:187):

1. < 100% maka dinyatakan tidak efisien,
2. = 100% maka dinyatakan efisiensi berimbang,
3. >100% maka dinyatakan efisien.

Berikut perhitungan efisiensi Program Pendidikan Menengah pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{100\%}{77,84\%} \times 100\% \\ &= 128,47\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan efisiensi pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA Program Pendidikan Menengah tahun 2018 diperoleh sebesar 128,47%, sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dikategorikan efisien.

Analisis perhitungan efisien untuk seluruh kegiatan pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2018 dan tahun 2019, akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 13**  
**Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Menengah Tahun 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMA	0	3,94	0,00%	Tidak Efisien
2	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	100	77,84	128,47%	Efisien
3	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	79,65	52,06	153,00%	Efisien
4	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	100	96,89	103,21%	Efisien
5	Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	83,33	72,46	115,00%	Efisien
6	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	100	97,12	102,97%	Efisien
7	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	100	83,1	120,34%	Efisien
8	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan / Bos Daerah	100	99,76	100,24%	Efisien
9	PPDB On Line SMA/SMK	0	0	0,00%	Tidak Efisien
10	Peningkatan Infrastruktur SMK	20,95	70,80	29,59%	Tidak Efisien
11	Pembangunan Pagar SMA	41,18	28,52	144,39%	Efisien
12	Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	45,45	95,41	47,64%	Tidak Efisien
13	Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	0	3,67	0,00%	Tidak Efisien
14	Pembangunan Pagar SMK	100	93,73	106,69%	Efisien
15	Pembangunan Perpustakaan	0	0,19	0,00%	Tidak Efisien
16	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	88,89	85,74	103,67%	Efisien
17	Peningkatan Infrastruktur SMA	66,67	23,55	283,10%	Efisien
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	0	0,35	0,00%	Tidak Efisien
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	39,02	28,46	137,10%	Efisien
20	Pengadaan Alat Kesenian SMA	100	96,47	103,66%	Efisien
21	Pengadaan Alat Labor SMK	100	4,96	206,13%	Efisien
22	Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya	0	0,78	0,00%	Tidak Efisien
23	Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	0	4,24	0,00%	Tidak Efisien
24	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	100	87,25	114,61%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.13**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
25	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMA	60	46,76	128,31	Efisien
26	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	0	3,04	0,00%	Tidak Efisien
27	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	12,05	37,41	32,21%	Tidak Efisien
28	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	0	0	0,00%	Tidak Efisien
29	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	100	97,39	102,68%	Efisien
30	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	100	82,72	120,89%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4. 14**  
**Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Menengah Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	99,05	97,87	101,21%	Efisien
2	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	50,00	52,10	95,97%	Tidak Efisien
3	Revitalisasi SMA	-	1,13	0,00%	Tidak Efisien
4	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK	-	0,55	0,00%	Tidak Efisien
5	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SMA	-	5,81	0,00%	Tidak Efisien
6	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	100,00	72,94	137,10%	Efisien
7	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	32,14	94,00	34,19%	Tidak Efisien
8	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA	100,00	73,36	136,31%	Efisien
9	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA	100,00	95,33	104,90%	Efisien
10	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	100,00	88,98	112,38%	Efisien
11	Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	-	3,81	0,00%	Tidak Efisien
12	Rehabilitasi SMA/SMK	100,00	92,27	108,38%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021



**Tabel 4.14**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
13	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	-	43,70	0,00%	Tidak Efisien
14	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	100,00	84,17	118,81%	Efisien
15	Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK	100,00	87,78	113,92%	Efisien
16	Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA	100,00	81,96	122,01%	Efisien
17	Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA	100,00	88,32	113,22%	Efisien
18	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	80,00	91,22	87,70%	Tidak Efisien
19	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	100,00	81,03	123,41%	Efisien
20	Pelatihan Pendidikan Tata Kelola Administrasi SMK	100,00	88,75	112,68%	Efisien
21	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan / BOS Daerah	100,00	95,47	104,74%	Efisien
22	Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknik	54,14	42,63	127,00%	Efisien
23	Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif Menjadi Guru Produktif Kerjasama dengan UNRI/UIN/UNAND/UNP	-	1,48	0,00%	Tidak Efisien
24	Peningkatan Infrastruktur SMK	91,67	46,48	197,22%	Efisien
25	Diklat Kepala Sekolah SMA	100,00	81,04	123,40%	Efisien
26	Pembangunan Pagar SMA	100,00	95,23	105,01%	Efisien
27	Pembangunan Perpustakaan SMK	100,00	10,58	945,18%	Efisien
28	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	88,89	77,40	114,84%	Efisien
29	Peningkatan Infrastruktur SMA	63,16	46,91	134,64%	Efisien
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	-	0,57	0,00%	Tidak Efisien
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	16,67	89,16	18,70%	Tidak Efisien
32	Pengadaan Alat Labor SMK	-	1,80	0,00%	Tidak Efisien
33	Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya	100,00	100,00	100,00%	Efisien Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.14**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
34	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	-	4,83	0,00%	Tidak Efisien
35	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SMK dan Kelengkapannya	100,00	4,93	2028,40%	Efisien
36	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	100,00	84,33	118,58%	Efisien
37	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	100,00	98,34	101,69%	Efisien
38	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	100,00	95,40	104,82%	Efisien
39	Diklat Kepala Sekolah SMK	92,50	81,72	113,19%	Efisien
40	Pembangunan Auditorium SMK / Gedung Serbaguna SMK	-	8,39	0,00%	Tidak Efisien
41	Sertifikasi Keahlian bagi Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi	100,00	87,23	114,64%	Efisien
42	Penyelenggaraan Pendidikan SLB (DAK)	100,00	97,01	103,08%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis data mengenai perhitungan efisiensi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 30 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 15**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018**  
**Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	18	60
Efisiensi Berimbang	0	0
Tidak Efisien	12	40
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 42 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 16**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019**  
**Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	27	64,29
Efisiensi Berimbang	1	2,38
Tidak Efisien	14	33,33
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

**Tabel 4. 17**  
**Perhitungan Efisiensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	100,00	82,23	121,61%	Efisien
2	Pengadaan Kalender Pendidikan	100,00	94,06	106,32%	Efisien
3	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik, dan Kependidikan Berprestasi Se-Provinsi Riau	100,00	89,35	111,92%	Efisien
4	Pengelolaan Data Pendidikan	100,00	28,82	346,98%	Efisien
5	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	100,00	79,88	125,19%	Efisien
6	Verifikasi, Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Program / Kegiatan, Bantuan Hibah, dan Bantuan Keuangan	100,00	96,17	103,98%	Efisien
7	Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	100,00	55,31	180,80%	Efisien
8	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	100,00	78,25	127,80%	Efisien
9	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	100,00	80,80	123,76%	Efisien
10	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	100,00	80,99	123,47%	Efisien
11	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	100,00	84,78	117,95%	Efisien
12	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	100,00	74,38	134,44%	Efisien
13	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	100,00	81,50	122,70%	Efisien
14	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	100,00	67,41	148,35%	Efisien
15	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	100,00	39,55	252,84%	Efisien
16	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	100,00	91,44	109,36%	Efisien
17	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	100,00	86,65	115,41%	Efisien
18	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	100,00	96,20	103,95%	Efisien
19	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	100,00	87,02	114,92%	Efisien
20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	100,00	72,83	137,31%	Efisien
21	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	100,00	68,86	145,22%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021



**Tabel 4.17**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
22	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	100,00	43,70	228,83%	Efisien
23	Kualifikasi S2 Terakreditasi	100,00	59,34	168,52%	Efisien
24	Pembinaan Olahraga dan Seni ( <i>Marching Band</i> ) SMA/SMK Provinsi Riau	-	4,93	0,00%	Tidak Efisien
25	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Mading Digital Interaktif	-	-	0,00%	Tidak Efisien
26	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA / SMK	100,00	97,19	102,89%	Efisien
27	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	100,00	55,75	179,37%	Efisien
28	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	-	6,72	0,00%	Tidak Efisien
29	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD / SMP dan Ujian Paket A / B / C	-	-	0,00%	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4. 18**  
**Perhitungan Efisiensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	67,50	76,87	87,81%	Tidak Efisien
2	Diklat Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembelajaran	100,00	94,15	106,21%	Efisien
3	Pengadaan Kalender Pendidikan	100,00	92,86	107,69%	Efisien
4	Pemberian Penghargaan kepada Siswa, Tenaga Pendidik, dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	100,00	95,26	104,98%	Efisien
5	Pengelolaan Data Pendidikan	100,00	66,02	151,47%	Efisien
6	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	100,00	97,09	103,00%	Efisien
7	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah	100,00	94,00	106,38%	Efisien
8	Verifikasi, Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Program / Kegiatan, Bantuan Hibah, dan Bantuan Keuangan	100,00	86,47	115,65%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.18**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
9	Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	100,00	88,17	113,42%	Efisien
10	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	100,00	93,41	107,05%	Efisien
11	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	100,00	94,81	105,47%	Efisien
12	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	100,00	95,02	105,24%	Efisien
13	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	100,00	93,27	107,22%	Efisien
14	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	100,00	93,16	107,34%	Efisien
15	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	100,00	92,63	107,96%	Efisien
16	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	100,00	69,11	144,70%	Efisien
17	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	100,00	49,12	203,58%	Efisien
18	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	83,33	80,03	104,12%	Efisien
19	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	100,00	93,73	106,69%	Efisien
20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	100,00	88,31	113,24%	Efisien
21	Debat Bahasa Inggris SMA	100,00	90,48	110,52%	Efisien
22	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	100,00	86,81	115,19%	Efisien
23	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	61,46	78,91	77,89%	Tidak Efisien
24	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	68,06	84,23	80,80%	Tidak Efisien
25	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	100,00	88,08	113,53%	Efisien
26	Kualifikasi S2 Terakreditasi	65,35	67,39	96,97%	Tidak Efisien
27	Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	82,67	81,14	101,89%	Efisien
28	Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Pelaporan BOS Se-Provinsi Riau	100,00	95,26	104,98%	Efisien
29	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA /SMK	100,00	37,90	263,85%	Efisien
30	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	55,00	100,00	55,00%	Tidak Efisien
31	Pencapaian SPM Pendidikan dan Pemantauan / Evaluasi SPM Pendidikan di Provinsi dan Kab / Kota	100,00	97,65	102,41%	Efisien
32	Diklat Muatan Lokal bagi Guru SMA / SMK Se-Provinsi Riau	100,00	85,46	117,01%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis data mengenai perhitungan efisiensi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 29 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 19**  
**Jumlah kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	25	86,21
Efisiensi Berimbang	0	0
Tidak Efisien	4	13,79
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 32 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 20**  
**Jumlah kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	27	84,4
Efisiensi Berimbang	0	0
Tidak Efisien	5	15,6
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

**Tabel 4. 21**  
**Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**  
**Tahun 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	100,00	48,64	205,59%	Efisien
2	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB, dan SMALB	100,00	90,28	110,77%	Efisien
3	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	100,00	93,78	106,63%	Efisien
4	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	100,00	89,32	111,96%	Efisien
5	Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	-	6,75	0,00%	Tidak Efisien
6	Pengadaan Meubiler SLB	-	2,44	0,00%	Tidak Efisien
7	Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	100,00	97,00	103,09%	Efisien
8	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	100,00	98,62	101,40%	Efisien
9	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	100,00	95,24	105,00%	Efisien
10	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	100,00	84,41	118,47%	Efisien
11	Festival Inovasi dan Kreatifitas PKPLK	100,00	97,60	102,46%	Efisien
12	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	100,00	86,38	115,77%	Efisien
13	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	100,00	77,15	129,62%	Efisien
14	Penyelenggaraan SMA Pintar	100,00	86,57	115,51%	Efisien
15	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	100,00	98,88	101,13%	Efisien
16	Apresiasi GTK PAUD DIKMAS dan Guru Berprestasi serta Berdedikasi Se-Propinsi Riau	100,00	93,50	106,95%	Efisien
17	Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	100,00	86,39	115,75%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021



**Tabel 4. 22**  
**Perhitungan Efisiensi Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB, dan SMALB	100,00	87,64	114,10%	Efisien
2	Penelusuran Minat Bakat dan Kreativitas PKPLK	100,00	94,37	105,97%	Efisien
3	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	100,00	97,47	102,60%	Efisien
4	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PKPLK	220,00	89,86	244,83%	Efisien
5	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK	75,00	93,59	80,14%	Tidak Efisien
6	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	100,00	82,46	121,27%	Efisien
7	Pengadaan Meubiler PKPLK	-	1,38	0,00%	Tidak Efisien
8	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	100,00	87,68	114,05%	Efisien
9	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	100,00	78,64	127,16%	Efisien
10	Festival Inovasi dan Kreativitas PKPLK	100,00	91,34	109,48%	Efisien
11	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	100,00	85,09	117,52%	Efisien
12	Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	100,00	77,21	129,52%	Efisien
13	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKPLK	80,00	93,33	85,72%	Tidak Efisien
14	Penyelenggaraan SMA Pintar	100,00	88,68	112,76%	Efisien
15	Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat	100,00	78,34	127,65%	Efisien
16	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	96,57	98,20	98,34%	Tidak Efisien
17	Penyelenggaraan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Bagi Daerah 3T dan KAT Provinsi Riau	66,67	98,83	67,46%	Tidak Efisien
18	Apresiasi GTK PAUD DIKMAS dan Guru Berprestasi serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	100,00	94,95	105,32%	Efisien
19	Diklat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	100,00	79,86	125,22%	Efisien
20	Kegiatan DAK Non Fisik Afirmasi (DAK)	100,00	15,35	651,47%	Efisien
21	Kegiatan DAK Non Fisik Kinerja (DAK)	100,00	0,39	25641,03 %	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis data mengenai perhitungan efisiensi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 17 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 23**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	15	88,24
Efisiensi Berimbang	0	0
Tidak Efisien	2	11,76
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 21 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 24**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	16	76,2
Efisiensi Berimbang	0	0
Tidak Efisien	5	23,8
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

### 4.2.3 Perhitungan Efektivitas

Rumus mengukur tingkat efektivitas ialah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria, menurut Mahsun (2020:187):

1. < 100% maka dinyatakan tidak efektif
2. = 100% maka dinyatakan efektivitas berimbang
3. > 100% maka dinyatakan efektif

Berikut perhitungan efektivitas Program Pendidikan Menengah pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{46 \text{ sekolah}}{46 \text{ sekolah}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan efektivitas pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA Program Pendidikan Menengah tahun 2018 diperoleh sebesar 100% , sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dikategorikan efektivitas berimbang.

Analisis perhitungan efektivitas seluruh kegiatan pada program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2018 dan tahun 2019, akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 25**  
**Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Menengah Tahun 2018**

No .	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMA	0 sekolah	47 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
2	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	46 sekolah	46 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
3	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	47 sekolah	59 sekolah	79,65%	Tidak Efektif
4	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	280 guru	280 guru	100,00%	Efektivitas Berimbang
5	Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA	50 guru	60 guru	83,33%	Tidak Efektif
6	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	150 guru	150 guru	100,00%	Efektivitas Berimbang
7	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	60 guru	60 guru	100,00%	Efektivitas Berimbang
8	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan / Bos Daerah	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
9	PPDB On Line SMA/SMK	0 sekolah	140 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
10	Peningkatan Infrastruktur SMK	22 orang	105 orang	20,95%	Tidak Efektif
11	Pembangunan Pagar SMA	14 sekolah	34 sekolah	41,18%	Tidak Efektif
12	Pengadaan Alat Peraga IPA SMA	10 sekolah	22 sekolah	45,45%	Tidak Efektif
13	Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK	0 sekolah	1 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
14	Pembangunan Pagar SMK	5 sekolah	5 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
15	Pembangunan Perpustakaan	0 sekolah	1 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
16	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	8 sekolah	9 sekolah	88,89%	Tidak Efektif
17	Peningkatan Infrastruktur SMA	8 sekolah	12 sekolah	66,67%	Tidak Efektif
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	0 sekolah	10 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	16 sekolah	41 sekolah	39,02%	Tidak Efektif
20	Pengadaan Alat Kesenian SMA	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
21	Pengadaan Alat Labor SMK	4 sekolah	4 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
22	Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya	0 sekolah	5 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
23	Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA	0 gedung	1 gedung	0,00%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2021



**Tabel 4.25**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
24	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	10 sekolah	10 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
25	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMA	12 sekolah	20 sekolah	60,00%	Tidak Efektif
26	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	0 sekolah	1 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
27	Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	10 ruang	83 ruang	12,05%	Tidak Efektif
28	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	0 sekolah	15 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
29	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	103 sekolah	103 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
30	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	59 sekolah	59 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4. 26**  
**Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Menengah Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	416 guru	420 guru	99,05%	Tidak Efektif
2	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	60 sekolah	120 sekolah	50,00%	Tidak Efektif
3	Revitalisasi SMA	0 sekolah	2 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
4	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK	0 sekolah	1 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
5	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SMA	0 sekolah	12 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
6	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	4 sekolah	4 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
7	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	9 sekolah	28 sekolah	32,14%	Tidak Efektif
8	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA	100 orang	100 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
9	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA	84 orang	84 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
10	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	120 orang	120 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.26**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
11	Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	0 sekolah	8 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
12	Rehabilitasi SMA/SMK	7 sekolah	7 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
13	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	0 siswa	500 siswa	0,00%	Tidak Efektif
14	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	250 guru	250 guru	100,00%	Efektivitas Berimbang
15	Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK	120 guru	120 guru	100,00%	Efektif Berimbang
16	Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA	40 orang	40 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
17	Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA	90 guru	90 guru	100,00%	Efektivitas Berimbang
18	MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	160 guru	200 guru	80,00%	Tidak Efektif
19	MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	120 guru	120 guru	100,00%	Efektivitas Berimbang
20	Pelatihan Pendidikan Tata Kelola Administrasi SMK	120 orang	120 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
21	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan / BOS Daerah	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
22	Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknika	72 siswa	133 siswa	54,14%	Tidak Efektif
23	Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif Menjadi Guru Produktif Kerjasama dengan UNRI/UIN/UNAND/UNP	0 guru	24 guru	0,00%	Tidak Efektif
24	Peningkatan Infrastruktur SMK	11 sekolah	10 sekolah	91,67%	Tidak Efektif
25	Diklat Kepala Sekolah SMA	60 orang	60 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
26	Pembangunan Pagar SMA	7 sekolah	7 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
27	Pembangunan Perpustakaan SMK	2 sekolah	2 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
28	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK	8 sekolah	9 sekolah	88,89%	Tidak Efektif
29	Peningkatan Infrastruktur SMA	12 sekolah	19 sekolah	63,16%	Tidak Efektif
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	0 sekolah	4 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	1 sekolah	6 sekolah	16,67%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.26**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
32	Pengadaan Alat Labor SMK	0 sekolah	4 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
33	Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya	1 sekolah	1 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
34	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	0 sekolah	3 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
35	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SMK dan Kelengkapannya	3 sekolah	3 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
36	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA	14 sekolah	14 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
37	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	74 sekolah	74 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
38	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	60 sekolah	60 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
39	Diklat Kepala Sekolah SMK	148 orang	160 orang	92,50%	Tidak Efektif
40	Pembangunan Auditorium SMK / Gedung Serbaguna SMK	0 sekolah	2 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
41	Sertifikasi Keahlian bagi Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi	180 orang	180 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
42	Penyelenggaraan Pendidikan SLB (DAK)	25 sekolah	25 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis data mengenai perhitungan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 30 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 27**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018**  
**Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	0	0
Efektivitas Berimbang	11	36,67
Tidak Efektif	19	63,33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 42 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 28**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019**  
**Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	0	0
Efektivitas Berimbang	22	52,38
Tidak Efektif	20	47,62
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*



**Tabel 4. 29**  
**Perhitungan Efektivitas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun**  
**2018**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	30 orang	30 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
2	Pengadaan Kalender Pendidikan	17047 eks	17047 eks	100,00%	Efektivitas Berimbang
3	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik, dan Kependidikan Berprestasi Se-Provinsi Riau	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
4	Pengelolaan Data Pendidikan	200 buku profil	200 buku profil	100,00%	Efektivitas Berimbang
5	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
6	Verifikasi, Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Program / Kegiatan, Bantuan Hibah, dan Bantuan Keuangan	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
7	Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
8	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	288 orang	288 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
9	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	300 orang	300 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
10	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	144 orang	144 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
11	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	5 cabang lomba	5 Cabang lomba	100,00%	Efektivitas Berimbang
12	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	6 cabang lomba	6 Cabang lomba	100,00%	Efektivitas Berimbang
13	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	180 orang	180 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
14	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	2913 orang	2913 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
15	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	382 orang	382 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
16	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	897 orang	897 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
17	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	6 cabang lomba	6 cabang lomba	100,00%	Efektivitas Berimbang
18	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
19	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Efektivitas Berimbang
20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	30 orang	30 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.29**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
21	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	9 lomba	9 lomba	100,00%	Efektivitas Berimbang
22	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Efektivitas Berimbang
23	Kualifikasi S2 Terakreditasi	112 orang	112 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
24	Pembinaan Olahraga dan Seni ( <i>Marching Band</i> ) SMA/SMK Provinsi Riau	0 bidang lomba	8 bidang lomba	0,00%	Tidak Efektif
25	Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Mading Digital Interaktif	0 sekolah	3 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
26	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA / SMK	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
27	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	100,00	100,00	100,00%	Efektivitas Berimbang
28	Pemetaan Sekolah Berbasis GIS	0 dokumen	1 dokumen	0,00%	Tidak Efektif
29	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD / SMP dan Ujian Paket A / B / C	0 orang	2054 orang	0,00%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4. 30**  
**Perhitungan Efektivitas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	27 orang	40 orang	67,50%	Tidak Efektif
2	Diklat Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembelajaran	282 orang	282 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
3	Pengadaan Kalender Pendidikan	11743 eks	11743 eks	100,00%	Efektivitas Berimbang
4	Pemberian Penghargaan kepada Siswa, Tenaga Pendidik, dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
5	Pengelolaan Data Pendidikan	560 orang	560 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
6	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.30**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
7	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah	270 orang	270 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
8	Verifikasi, Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Program / Kegiatan, Bantuan Hibah, dan Bantuan Keuangan	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
9	Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	13 orang	13 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
10	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	5 cabang	5 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
11	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	5 cabang	5 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
12	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	144 orang	144 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
13	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	6 cabang	6 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
14	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	2 cabang	2 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
15	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	5 cabang	5 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
16	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	7 perguruan tinggi	7 perguruan tinggi	100,00%	Efektivitas Berimbang
17	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	5 perguruan tinggi	5 perguruan tinggi	100,00%	Efektivitas Berimbang
18	Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	6 perguruan tinggi	6 perguruan tinggi	83,33%	Tidak Efektif
19	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	7 cabang	7 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	5 mendali	5 mendali	100,00%	Efektivitas Berimbang
21	Debat Bahasa Inggris SMA	48 siswa	48 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
22	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	324 siswa	324 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
23	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	118 orang	192 orang	61,46%	Tidak Efektif
24	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	196 orang	288 orang	68,06%	Tidak Efektif
25	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	150 orang	150 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
26	Kualifikasi S2 Terakreditasi	83 orang	127 orang	65,35%	Tidak Efektif
27	Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	186 orang	225 orang	82,67%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.30**  
**Lanjutan**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi kinerja	Target Kineja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
28	Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Pelaporan BOS Se-Provinsi Riau	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
29	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA /SMK	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
30	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	33 guru	60 guru	55,00%	Tidak Efektif
31	Pencapaian SPM Pendidikan dan Pemantauan / Evaluasi SPM Pendidikan di Provinsi dan Kab / Kota	12 bulan	12 bulan	100,00%	Efektivitas Berimbang
32	Diklat Muatan Lokal bagi Guru SMA / SMK Se-Provinsi Riau	415 orang	415 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021



Hasil analisis data mengenai perhitungan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 29 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 31**  
**Jumlah kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	0	0
Efektivitas Berimbang	25	86,21
Tidak Efektif	4	13,79
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 32 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 32**  
**Jumlah kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	0	0
Efektivitas Berimbang	25	78,1
Tidak Efektif	7	21,9
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

**Tabel 4. 33**  
**Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**  
**Tahun 2018**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	12 bulan	12 bulan	100,00%	Efektivitas Berimbang
2	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB, dan SMALB	157 orang	157 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
3	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	175 siswa	175 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
4	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	12 bulan	12 bulan	100,00%	Efektivitas Berimbang
5	Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK	0 sekolah	3 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
6	Pengadaan Meubiler SLB	0 sekolah	13 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
7	Pengadaan Alat Kesenian PKPLK	1 sekolah	1 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
8	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	300 siswa	300 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
9	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Efektivitas Berimbang
10	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	160 siswa	160 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
11	Festival Inovasi dan Kreatifitas PKPLK	6 lomba	6 lomba	100,00%	Efektivitas Berimbang
12	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	300 siswa	300 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
13	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	130 siswa	130 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
14	Penyelenggaraan SMA Pintar	216 siswa	216 siswa	100,00%	Efektivitas Berimbang
15	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	204 orang	204 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
16	Apresiasi GTK PAUD DIKMAS dan Guru Berprestasi serta Berdedikasi Se-Propinsi Riau	156 orang	156 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
17	Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan	240 orang	240 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4. 34**  
**Perhitungan Efektivitas Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**  
**Tahun 2019**

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB, dan SMALB	100 sekolah	100 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
2	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	350 orang	350 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
3	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	12 bulan	12 bulan	100,00%	Efektivitas Berimbang
4	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PKPLK	11 sekolah	5 sekolah	220,00%	Efektif
5	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK	3 sekolah	4 sekolah	75,00%	Tidak Efektif
6	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	300 orang	300 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
7	Pengadaan Meubiler PKPLK	0 sekolah	11 sekolah	0,00%	Tidak Efektif
8	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	400 orang	400 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
9	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	1 sekolah	1 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
10	Festival Inovasi dan Kreatifitas PKPLK	3 cabang	3 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
11	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	12 bulan	12 bulan	100,00%	Efektivitas Berimbang
12	Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	4 sekolah	4 sekolah	100,00%	Efektivitas Berimbang
13	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKPLK	8 sekolah	10 sekolah	80,00%	Tidak Efektif
14	Penyelenggaraan SMA Pintar	12 bulan	12 bulan	100,00%	Efektivitas Berimbang
15	Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat	122 orang	122 orang	100,00%	Efektivitas Berimbang
16	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	197 orang	204 orang	96,57%	Tidak Efektif
17	Penyelenggaraan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Bagi Daerah 3T dan KAT Provinsi Riau	8 kab/kota	12 kab/kkota	66,67%	Tidak Efektif
18	Apresiasi GTK PAUD DIKMAS dan Guru Berprestasi serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	13 cabang	13 cabang	100,00%	Efektivitas Berimbang
19	Diklat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Efektivitas Berimbang
20	Kegiatan DAK Non Fisik Afirmasi (DAK)	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang
21	Kegiatan DAK Non Fisik Kinerja (DAK)	12 kab/kota	12 kab/kota	100,00%	Efektivitas Berimbang

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis data mengenai perhitungan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 17 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 35**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	0	0
Efektivitas Berimbang	15	88,24
Tidak Efektif	2	11,76
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 21 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 36**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	1	4,76
Efektivitas Berimbang	15	71,43
Tidak Efektif	5	23,81
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*



### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis *Value for Money* Program Pendidikan Menengah

##### 1. Perhitungan Ekonomi

Pada periode tahun 2018, keseluruhan kegiatan Program Pendidikan Menengah memperoleh perhitungan ekonomi yang sangat baik. Hasil analisis menunjukkan dari 30 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, seluruh kegiatannya dinyatakan ekonomis yaitu memperoleh nilai dibawah 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 16 kegiatan, persentase 50-100% berjumlah 14 kegiatan. Artinya, pada Program Pendidikan Menengah tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mampu menggunakan dana dengan hemat, yaitu kurang dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp543.636.247.877,17 dengan realisasi sebesar Rp400.376.135.996,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp143.260.111.881,17.

Pada Tabel 4.4 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 42 kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Pendidikan Menengah tahun 2018, diantaranya terdiri dari 41 kegiatan dinyatakan ekonomis, karena nilai perhitungan ekonomi diperoleh kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 15 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 26 kegiatan. Dikatakan ekonomis, artinya Dinas Pendidikan Provinsi Riau mampu meminimalisir pemborosan dalam penggunaan dana. Sebagaimana Mardiasmo (2018:165) menyatakan bahwa

ekonomi merupakan kehematan mencakup pengelolaan secara hati-hati dan cermat, tidak adanya pemborosan, yaitu mampu mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain itu, terdapat 1 kegiatan yang dinyatakan ekonomi berimbang, yaitu nilai ekonomi diperoleh sama dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada kegiatan tersebut, yaitu kegiatan pembangunan USB SMA dan kelengkapannya, penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp456.361.160.545,00 dengan realisasi sebesar Rp400.381.745.668,13. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp55.979.414.876,87.

## 2. Perhitungan Efisiensi

Perhitungan efisiensi seluruh kegiatan pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2018 dapat dikatakan cukup efisien. Kinerja suatu organisasi dikatakan efisien, apabila tingkat perhitungan efisiensi memperoleh hasil lebih dari 100%. Pada Tabel 4.15 hasil analisis menunjukkan dari 30 kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2018, hanya 18 kegiatan yang dinyatakan efisien. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mampu menghasilkan hasil kerja yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang rendah yang rendah melalui 18 kegiatan yang telah dinyatakan efisien, yang mana 18 kegiatan tersebut memperoleh nilai tingkat efisiensi lebih dari 100%.

Perhitungan efisiensi pada periode tahun 2019, hasil analisis pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 42 kegiatan yang telah dilaksanakan, hanya 27 kegiatan

yang dinyatakan efisien, pada 27 kegiatan tersebut, telah mampu memperoleh nilai lebih dari 100% sehingga Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah dinyatakan cukup efisien.

### 3. Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja berupa program ataupun kegiatan yang dijalankan telah mencapai tujuan. Perhitungan efektivitas pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2018 memperoleh hasil yang kurang efektif. Pada Tabel 4.27 hasil analisis menunjukkan dari 30 kegiatan hanya 11 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, yaitu kegiatan yang tingkat efektivitasnya mencapai 100%, artinya hasil kinerja dari 11 kegiatan tersebut sesuai dengan target yang diharapkan. Sedangkan kegiatan yang dinyatakan tidak efektif bernilai lebih besar, yaitu 19 kegiatan. Kegiatan yang masuk dalam kriteria efektif pada program ini berjumlah 0. Artinya, tidak ada kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas lebih dari 100%. Kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang melebihi dari target yang ditentukan, hanya berjalan sesuai dengan target.

Perhitungan efektivitas pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2019, mengalami peningkatan nilai efektivitas dari tahun sebelumnya (2018). Namun, tetap dikategorikan kurang efektif. Pada Tabel 4.28 hasil analisis menunjukkan dari 42 kegiatan, hanya 22 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, sedangkan sisanya, yaitu 20 kegiatan dinyatakan tidak efektif. Perbandingan antara jumlah kegiatan yang bernilai efektivitas berimbang dengan

kegiatan yang bernilai tidak efektif, terlihat tidak menunjukkan perbandingan jumlah yang signifikan. Sedangkan untuk kegiatan berkriteria efektif pada program ini berjumlah 0. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, hanya berjalan sesuai dengan target.

#### **4.3.2 Analisis *Value for Money* Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

##### **1. Perhitungan Ekonomi**

Perbandingan *input* dan harga *input* pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan periode tahun 2018 dan 2019, diperoleh hasil perhitungan ekonomi bernilai sangat ekonomis. Pada tahun 2018, sebanyak 29 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini seluruhnya dinyatakan ekonomis, karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 6 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 23 kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp71.663.802.630,00 dengan realisasi sebesar Rp48.190.093.505,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp23.473.709.125.

Pada tahun 2019, Hasil analisis menunjukkan dari seluruh kegiatan yang berjumlah 32 kegiatan yang dilaksanakan, 31 kegiatan diantaranya dinyatakan ekonomis, karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 2 kegiatan dan persentase 50-100% berjumlah 29 kegiatan. Artinya, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan periode tahun 2018 dan 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat



dalam penggunaan dana. Kemudian, terdapat 1 kegiatan yang bernilai ekonomis berimbang, karena memperoleh nilai ekonomi sama dengan 100%. Kegiatan tersebut adalah kegiatan Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp80.253.025.300,00 dengan realisasi sebesar Rp58.984.453.844,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp21.268.571.456,00.

## 2. Perhitungan Efisiensi

Perhitungan efisiensi pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2018, memperoleh hasil yang dapat dikatakan efisien. Pada tabel 4.19 hasil analisis menunjukkan dari jumlah 29 kegiatan yang dilaksanakan, 25 kegiatan dinyatakan efisien, dan hanya 4 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. 25 kegiatan yang dinyatakan efisien, karena memperoleh nilai efisiensi lebih dari 100%. 25 kegiatan tersebut, mampu menghasilkan *output* sesuai target dengan penggunaan *input* kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan efisiensi pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2019, juga memperoleh hasil yang dapat dikatakan efisien. Pada Tabel 4.20 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 32 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 27 kegiatan yang dinyatakan efisien yaitu memperoleh hasil nilai efisiensi lebih dari 100%, dan hanya 5 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. 27 kegiatan ini mampu menghasilkan *output* sesuai target dengan penggunaan *input* kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

### 3. Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan periode tahun 2018 dan 2019 dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2018, tabel 4.31 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 29 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 25 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, karena memperoleh nilai efektivitas sama dengan 100%. Hasil kinerja yang sesuai target pada program ini, diimplementasikan pada 25 kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 4 kegiatan yang dinyatakan tidak efektif, karena hasil kinerja yang dihasilkan tidak mencapai target. Sedangkan untuk kegiatan yang berkriteria efektif, pada program ini berjumlah 0. Artinya, tidak ada kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas lebih dari 100%. Kegiatan hanya berjalan sesuai target, tanpa ada upaya untuk melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, dari 32 kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat 25 kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas berimbang, karena perhitungan efektivitas pada 25 kegiatan tersebut memperoleh nilai sama dengan 100%. Kemudian, terdapat 7 kegiatan yang memperoleh nilai kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, nilai kurang dari 100% dinyatakan tidak efektif. Artinya, 7 kegiatan tersebut belum berhasil dalam menghasilkan hasil kerja yang mencapai target, dan 0 kegiatan yang termasuk dalam kriteria efektif.

### 4.3.3 Analisis *Value for Money* Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

#### 1. Perhitungan Ekonomi

Perhitungan ekonomi pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus periode tahun 2018 dan 2019, diperoleh hasil bernilai ekonomis. Pada tahun 2018, sebanyak 17 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, seluruhnya dinyatakan ekonomis karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 3 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 14 kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp43.890.299.230,00 dengan realisasi sebesar Rp37.519.038.717,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp6.371.260.513,00.

Pada tahun 2019, Hasil analisis menunjukkan dari seluruh kegiatan yang berjumlah 21 kegiatan, seluruh kegiatannya juga yang dinyatakan ekonomis, karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 3 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 18 kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp84.055.679.800,00 dengan realisasi sebesar Rp44.682.864.464,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp39.372.815.336,00.

## 2. Perhitungan Efisiensi

Perhitungan efisiensi pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2018, memperoleh hasil yang dapat dikatakan efisien. Pada Tabel 4.23, hasil analisis menunjukkan dari jumlah 17 kegiatan yang dilaksanakan, 15 kegiatan dinyatakan efisien, dan hanya 2 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. 15 kegiatan yang dinyatakan efisien, karena memperoleh nilai efisiensi lebih dari 100%. 15 kegiatan tersebut, mampu menghasilkan *output* sesuai target dengan penggunaan *input* kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 4.24, menunjukkan bahwa dari 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Program Khusus dan Layanan Khusus tahun 2019, 16 kegiatan dinyatakan masuk ke dalam kriteria efisien, dan hanya 5 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Sehingga kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada program ini dapat dikatakan cukup efisien.

## 3. Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus periode tahun 2018 dan 2019 dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2018, Tabel 4.35 menunjukkan bahwa dari 17 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 15 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, karena memperoleh nilai efektivitas sama dengan 100%. Hasil kinerja yang sesuai target pada program ini, diimplementasikan pada 15 kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 2 kegiatan yang dinyatakan tidak efektif, karena hasil kinerja yang dihasilkan tidak mencapai target.



Pada tahun 2019, Tabel 4.36 menunjukkan bahwa dari 21 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 1 kegiatan yang dikatakan efektif, karena nilai efektivitas yang diperoleh lebih dari 100%. Kegiatan tersebut adalah kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana PKPLK. Kegiatan tersebut mampu menghasilkan kinerja melebihi target yang telah direncanakan. Kegiatan ini, merupakan satu-satunya yang memenuhi kriteria dari 3 indikator *value for money*. Kemudian, terdapat 15 kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas berimbang, karena perhitungan efektivitas pada 15 kegiatan tersebut memperoleh nilai sama dengan 100%. Kemudian, terdapat 5 kegiatan yang memperoleh nilai kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, nilai kurang dari 100% dinyatakan tidak efektif.

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 pada seluruh program dikategorikan ekonomis, cukup efisien, tetapi kurang efektif. Banyak kegiatan dari setiap program memperoleh nilai efektivitas berimbang, yaitu nilai sama dengan 100% artinya realisasi kinerja sudah sesuai dengan target. Namun, yang memenuhi kriteria efektif hanya satu kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana PKPLK pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau masih menjalankan kegiatan dari setiap programnya hanya sesuai dengan target, tanpa adanya upaya untuk melampaui dari target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan, akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

**Tabel 4. 37**  
**Value for Money Akuntabilitas Kinerja**

No	Value for Money	Tahun	
		2018	2019
1	Ekonomis	<p>Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 terhadap ketiga program yang telah dianalisis dikategorikan ekonomis. Pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus, seluruh kegiatannya (100%) dinyatakan ekonomis.</p>	<p>Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019 terhadap ketiga program yang telah dianalisis, dikategorikan ekonomis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Program Pendidikan Menengah dari 42 kegiatan, terdapat 41 kegiatan (97,62%) yang dinyatakan ekonomis.</li> <li>2. Pada program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dari 32 kegiatan, terdapat 31 kegiatan (96,88%) yang dinyatakan ekonomis.</li> <li>3. Pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus seluruh kegiatan (100%) dinyatakan ekonomis.</li> </ol>
2	Efisiensi	<p>Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 terhadap ketiga program yang telah dianalisis, dikategorikan cukup efisien.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Program Pendidikan Menengah dari 30 kegiatan, hanya 18 kegiatan (60%) yang dinyatakan efisien.</li> <li>2. Pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari 29 kegiatan, terdapat 25 kegiatan (86,21%) yang dinyatakan efisien.</li> <li>3. Pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dari 17 kegiatan, terdapat 15 (88,24%) kegiatan yang dinyatakan efisien.</li> </ol>	<p>Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019 terhadap ketiga program yang telah dianalisis, dikategorikan cukup efisien.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Program Pendidikan Menengah dari 42 kegiatan, hanya 27 kegiatan (64,29%) yang dinyatakan efisien. Pada</li> <li>2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari 32 kegiatan, terdapat 27 (84,4%) kegiatan yang dinyatakan efisien. Pada</li> <li>3. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dari 21 kegiatan, terdapat 16 kegiatan (76,2%) yang dinyatakan efisien.</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2021

**Tabel 4.37**  
**Lanjutan**

No	Value for Money	Tahun	
		2018	2019
3	Efektivitas	<p>Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 terhadap ketiga program yang telah dianalisis, dikategorikan kurang efektif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Program Pendidikan Menengah dari 30 kegiatan, kegiatan yang dinyatakan efisien berjumlah 0, kegiatan dengan kriteria efektivitas berimbang berjumlah 11 kegiatan (36,7%),</li> <li>2. Pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari 29 kegiatan, kegiatan yang dinyatakan efisien berjumlah 0, kegiatan dengan kriteria efektivitas berimbang berjumlah 25 kegiatan (86,2%).</li> <li>3. Pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dari 30 kegiatan, kegiatan yang dinyatakan efisien berjumlah 0, kegiatan dengan kriteria efektivitas berimbang berjumlah 15 kegiatan (88,24%).</li> </ol>	<p>Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019 terhadap ketiga program yang telah dianalisis, dikategorikan kurang efektif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Program Pendidikan Menengah dari 42 kegiatan, kegiatan yang dinyatakan efisien berjumlah 0, kegiatan dengan kriteria efektivitas berimbang berjumlah 22 (52,38%)</li> <li>2. Pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari 30 kegiatan, kegiatan yang dinyatakan efisien berjumlah 0, kegiatan dengan kriteria efektivitas berimbang berjumlah 25 kegiatan (78,1%).</li> <li>3. Pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dari 30 kegiatan, kegiatan yang dinyatakan efisien berjumlah 1 (4,76%), kegiatan dengan kriteria efektivitas berimbang berjumlah 15 kegiatan (71,43%).</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2021

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan:

1. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah tahun 2018-2019, dikategorikan ekonomis, cukup efisien, dan kurang efektif.
2. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2018-2019, dikategorikan ekonomis, efisien, dan kurang efektif.
3. Kinerja keuangan pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2018-2019, dikategorikan ekonomis, efisien, dan kurang efektif.
4. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Saran tersebut mencakup:



1. Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dari aspek ekonomis diharapkan untuk dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus melakukan estimasi anggaran belanja dengan model-model yang relevan, guna meminimalisir penetapan anggaran yang terlalu tinggi.
2. Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau dari aspek efisiensi perlu ditingkatkan. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan hasil kerja (*output*) dengan perbandingan yang lebih besar daripada peningkatan *input*. Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus dapat meningkatkan sumber daya manusia, sehingga peningkatan *output* dapat tercapai dan memenuhi prinsip *value for money*.
3. Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau dari aspek efektivitas perlu ditingkatkan, dengan cara merencanakan dan menyusun kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada kegiatan dari masing-masing program. Sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berdampak bagi masyarakat.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan lebih memperhatikan prinsip *value for money* dalam mengevaluasi dan mengelola kinerja di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., & Anang, Subarjo. 2017. Konsep Value for Money dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6 (6): 1–15.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ardila, Isna., & Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15 (1): 52–64.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2019. *Statistik Pendidikan Provinsi Riau 2019*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
- Barr, J., & Chistie, A. 2015. Improving the Practice of Value for Money. *Centre for Development Impact*, 12: 1–9.
- Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwinanda, Yosie. 2018. *Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Halim, Abdul., & Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastoro, H. A. 2016. Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18 (1): 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>.
- Hermawan, I. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Jakupec, V., & Kelly, Max. 2016. Assessing the Impact of Foreign Aid: Value for Money and Aid for Trade. In *Assessing the Impact of Foreign Aid: Value for Money and Aid for Trade*. <https://doi.org/10.1016/C2015-0-00255-6>.
- Mahmudi. 2018. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahsun, Mohamad. 2020. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

- Ningsih, N. N., Masyithoh, S., & Abni, I. 2017. Analisis kinerja kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan value for money. *Journal KINERJA*, 14(1): 52–60.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8 (4): 781–788. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31072>.
- Pratiwi, W. 2016. *Audit Sektor Publik*. Bogor: In Media.
- Putra, S. Y. 2020. "Angka Putus Sekolah di Riau Tertinggi ke 3 Nasional, DPRD Sebut Gara-gara Ruang Kelas Terbatas." <https://www.cakaplah.com/berita/baca/55558/2020/06/26/angka-putus-sekolah-di-riau-tertinggi-ke-3-nasional-dprd-sebut-garagara-ruang-kelas-terbatas#sthash.YENJ3gBx.dpbs>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2020.
- Putri, Nur Zeni Amilia. 2020. *Analisis Value for Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. 2018. Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4 (1): 31–43. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10912>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, K. W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19 (1): 4.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Yang Mengatur Tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Yang Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Yang Mengatur Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 47 Tahun 2008 Yang Mengatur Tentang Wajib Belajar.

- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Yang Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Yang Mengatur tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.